BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Setelah menjabarkan hal-hal yang melatarbelakangi penelitian, teori-teori yang telah mengukuhkan penelitian, maupun metode penelitian yang digunakan, maka dalam bab ini akan dipaparkan mengenai hasil dari penelitian. Hasil penelitian akan dijabarkan berdasarkan data sekunder yang telah diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pusat Statistik, dan Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan selama periode tahun 2002-2009.

4.1.1 Sejarah Perpajakan Indonesia

Di Indonesia sebelum kedatangan bangsa Eropa, kerajaan seperti Mataram, Kediri, Majapahit, dan Pajang sudah mengenal bentuk pajak tanah dan pajak tidak langsung terhadap barang dagangan. Upeti perorangan ataupun kelompok orang diberikan kepada raja atau penguasa sebagai bentuk penghormatan dan tunduk patuh pada kekuasaan raja atau penguasa suatu wilayah di Indonesia merupakan bentuk pajak pada zaman kerajaan-kerajaan di Indonesia tumbuh. Upeti tersebut berupa hasil bumi, dan pemajakan barang perdagangan. Sebagai imbalannya, maka rakyat mendapatkan pelayanan keamanan dan jaminan ketertiban. Di kerajaan Mataram raja-raja sudah melaksanakan hidup swasembada dan otonom. Penyerahan tersebut lebih besar kepada kepentingan ekonomi daerah

atau kerajaan, membiayai penyelenggaraan pemerintah setempat, dan membiayai pertahanan dan kekuatan kerajaan.

Kemudian VOC sebagai badan perdagangan menguasai wilayah Indonesia, dan tidak memungut pajak di daerah kekuasaannya, seperti Batavia, Maluku, dan lain-lain. Tetapi mengenakan Pajak Usaha, Pajak Rumah, dan Pajak Kepala kepada pedagang Cina dan pedagang lainnya. Selain itu VOC memiliki monopoli penjualan candu, garam, pemetikan sarang burung dan lain-lain yang dijualnya pada *pacht-pacht* yang biasanya dipegang oleh kapiten (Onghokham, dalam Bakhrun Effendi). Menurut Levyson Norman, gubernur Jenderal Daendels juga mengadakan pemungutan pajak, menarik pajak dari pintu gerbang dan pajak penjualan barang di pasar (*bazarregten*) termasuk pula pungutan pajak terhadap rumah jadi (Siti Hatijah, dalam Bakhrun Effendi).

Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles (1811-1815) menyelenggarakan administrasi dan reorganisasi yang mengeluarkan banyak uang. Raffles mengadakan pembaruan sistem pajak yang dikenal dengan *landrente stelsel*, dimana sistem pajak tersebut mengambil contoh dari Benggala India.

Pada masa penjajahan kolonial, pajak merupakan hal yang dieksploitasi untuk kepentingan penjajah. Pajak dilaksanakan tidak memperhatikan keadilan, kemampuan, dan hak asasi manusia Indonesia, tetapi menjadi beban penderitaan dan pengorbanan luar biasa rakyat Indonesia. Beberapa jenis pajak yang sejak masa penjajahan telah diterapkan di Indonesia dan perkembangannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sejarah Pajak Bumi dan Bangunan

Sejarah Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia dimulai dari pengenaan pajak tanah (*Land Rent*) oleh pemerintahan kolonial Inggris yang dipimpin oleh Thomas Stanford Raffles pada abad 19 tepatnya tahun 1813 di pulau Jawa.

Raffles menentukan pajak ini pada individu bukan pada desa. Raffles membagi tanah atas kelompok-kelompok terhadap tanah kering dan tanah basah, pengenaan pajaknya adalah rata-rata produksi pertahun untuk sawah, dan tegalan.

Sejalan dengan kebijaksanaan kerja paksa (*forced labour policy*) tahun 1854, dimulailah kodefikasi aturan-aturan tentang sewa tanah (*the codification of landrent regulation 1854*). Dalam Azhari A. Samudra (2005) Tobias Soebekti mengemukakan tanah dikelompokan menurut aturan yang berlaku termasuk yang diaur dalam *Statute Books* (Lembaran Negara) tahun 1866 No. 219b. pengelompokan tanah didasarkan pada survey statistik berdasarkan jumlah produksi nyata selama tiga tahun terakhir.

Pada masa penjajahan Jepang 1942-1945 sistem pajak tanah yang dilaksanakan Belanda sepenuhnya diambil alih dan namanya diganti menjadi pajak tanah.

- Tahun 1945 – 1951

  Pajak bumi semula pelaksanaan pemungutannya dengan cara lama digunakan secara penuh, kemudian pajak bumi di wilayah Negara

Republik Indonesia dengan pusat pemerintahan di Yogyakarta dihapus, sedangkan di wilayah federal pajak bumi terus berlaku. Selanjutnya pada tahun 1951 pajak bumi di Negara Republik Indonesia dihapus, diganti dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1951, yaitu Pajak Penghasilan atas Tanah Pertanian (PPTP).

- Tahun 1951 – 1959

  UU No. 14 Tahun 1951 melahirkan Jawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia (P3TMI). Tugasnya adalah melakukan pendaftaran atas tanah milik adat yang ada di Indonesia. Namun karena P3TMI ini ternyata dianggap hanya mengurus pendaftaran tanah saja, maka namanya diubah lagi menjadi Jawatan Pendaftaran Tanah Milik Indonesia (PTMI). Tugasnya yaitu menjadikan tugas yang sama seperti yang di atas ditambah kewenangan untuk mengeluarkan Surat Pendaftaran Sementara terhadap tanah milik yang sudah terdaftar.

- Tahun 1959 – 1985

  Peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang (PERPU) No. 11 Tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi telah ditetapkan menjadi undang-undang, yaitu Undang – Undang No.1 Tahun 1961. Selanjutnya nama jawatan yang mengelola pajak hasil bumi diubah menjadi Ditektorat Pajak Hasil Bumi. Kemudian sesuai dengan SK Menteri Iuran Negara PMPPU 1-1-3 29 November 1965, Direktorat Pajak Hasil Bumi diubah namanya menjadi Direktorat Iuran

Pembangunan Daerah (IPEDA). Pengenaan iuran pembangunan daerah dilakukann terhadap tanah-tanah di pedesaan, perkotaan, perhutanan, perkebunan, dan pertambangan.

- Tahun 1985 – 1995

  Berdasarkan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 telah diadakan *tax reform*, yaitu diadakan pembaruan dan penggantian atas peraturan perundang-undangan perpajakan yang selama ini berlaku. *Tax reform* tahun 1983 ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 1984. Dengan adanya *tax reform*, maka sistem perpajakan Indonesia berubah dari *Official Assesment* menjadi *Self Assesment*. *Tax reform* 1983 melahirkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang ditetapkan pada tanggal 1 Januari 1986. Pada tanggal 9 November 1994 telah disahkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang PBB yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995.

2. Sejarah Pajak Penghasilan

   - Sebelum 1920

     Di Indonesia diberlakukan sistem pajak yang berbeda untuk pribumi, untuk orang asing Asia, dan untuk orang Eropa *("Indigenous" Indonesians, "foreign" Asians, and "Europeans"*). Pajak pendapatan bagi orang Eropa (*tax patent duty*), dan untuk orang Indonesia adalah pajak pendapatan yang disebut *business tax*.

- Tahun 1920

  Undang-undang Pajak Pendapatan disusun dan ditetapkan. Mansury menjelaskan, Ordonansi PPd 1920 (*The Income Tax Ordinance of 1920*). Diberlakukannya pajak yang sama tanpa melihat asal usul keturunan (*The Unification Principle*). Pada masa ini pula diperkenalkan pajak kekayaan.

  Kemudian tahun 1921 menurut Tobias Subekti dalam Siti Kurnia Rahayu diperbarui menjadi *The Reseived Ordinance On The Income Tax of 1920*. Pendapatan menurut ordonansi ini adalah jumlah keseluruhan yang diterima baik dalam bentuk uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh dari barang-barang bergerak atau tidak gerak, atau dari kegiatan perdagangan atau pekerjaan keilmuan atau pekerjaan lain, baik yang dikerjakan sekali-sekali atau secara kontinu; kegiatan kantor perusahaan, pelayanan, dan dari keuntungan lain yang diperoleh setelah dikurangi ongkos-ongkos pengeluaran.

- Tahun 1932 – 1983

  Mansury dalam Siti Kurnia Rahayu mengemukakan bahwa Ordonansi Pajak Pendapatan 1920 diganti dengan *Personal Income Tax Ordinance of 1932* (Ordonansi Pajak Pendapatan 1932 = *Ordonantie op de Inkomstenbelasting 1932)* pada tahun 1932. Kemudian diganti menjadi Ordonansi Pajak Pendapatan 1944. Ordonansi Pajak Pendapatan ini semula bernama "Pajak Perang" (*Oorlogsbelasting*). Sejak 1 Januari 1946 diubah menjadi Pajak Peralihan

(*Overgangsbelasting*). Kemudian dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 1957 (LN No. 41 Tahun 1957) nama ordonansi tersebut dengan resmi menjadi Ordonansi Pajak Pendapatan 1944. Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 ini dalam bentuk aslinya disiapkan di Australia oleh pemerintah Hindia Belanda dalam pelarian, sewaktu Indonesia diduduki Jepang. Ditetapkan bahwa subjek pendapatan adalah orang pribadi dan badan, sedangkan objek pajaknya adalah pendapatan bersih.

Rancangan ordonansi tersebut disusun dalam tahun 1943, diumumkan dalam *Staatsblads 1944 No. 17*, dan dinyatakan mulai berlaku sejak 1 Januari 1945. Pada saat yang bersamaan maka *Ordonantie op de Inkomstenbelasting 1932*" dinyatakan tidak berlaku. Perubahan-perubahan maupun tambahan-tambahan yan principal berturut-turut dilakukan oleh pemerintah sejak 1960, terakhir UU No. 9 Tahun 1970.

- Tahun 1984

  Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang PPh yang disahkan tanggal 31 Desember 1983, dan berlaku pada tanggal 1 Januari 1984. Kemudian ada perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983, yaitu disahkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1991 tentang Pajak Penghasilan. Tahun 1994 telah lahir pula Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

No. 7 Tahun 1991. Terakhir diubah lagi dengan UU No. 17 Tahun 2000 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2001.

3. Sejarah Pajak Perseroan

Mansyuri dalam Siti Kurnia Rahayu menjelaskan bahwa tahun 1925 ditetapkan peraturan perundang-undangan *Corporatio Tax Ordinance of 1925* (Ordonansi Pajak Perseroan PPS 1925). PPS ini berlaku sampai dengan 1983. Subjeknya adalah badan hokum, yaitu PT, CV, atas saham. Objeknya adalah laba bersih.

Gunawan Wibisono menjelaskan suatu pajak atas pendapatan dan laba, untuk pertama kali diadakan di Indonesia pada tahun 1878 dengan nama *patentrecht*. *Patentrecht* ini merupakan suatu pungutan pajak yang sederhana. Suatu pungutan pajak atas pendapatan dan laba berdasarkan ketentuan yang lebih teratur dan terinci baru ada pada tahun 1908 sejak adanya Ordonansi Pajak Pendapatan 1908 (*Ordonantie op de Inkornstenbelasting 1908*). Seperti halnya *patentrecht*, Ordonansi Pajak Pendapatan 1908 hanya berlaku terhadap golongan penduduk Eropa dan orang-orang yang disamakan dengan orang Eropa, demikian pula terhadap badan-badan usaha yang dimilikinya. Sedangkan untuk orang-orang pribumi dan lain-lainnya terkena jenis pajak yang lebih sederhana seperti *Landrente* atau *Landrent*, dan *Hoofdelijke Belasting*.

Dengan pecahnya Perang Dunia I (1914-1918), menyebabkan Hindia Belanda berada dalam keadaan terlepas dengan negeri Belanda. Untuk menggalang persatuan, maka perlu diberlakukan “asas unifikasi”,

yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa semua golongan penduduk memiliki kedudukan yang sama di hadapan hokum. Pelaksanaan asas unifikasi di bidang perpajakan telah membawa akibat digantinya Ordonansi Pajka Pendapatan 1908 (yang hanya berlaku untuk golongan penduduk tertentu) dengan Ordonansi Pajak Pendapatan 1920 (yang berlaku untuk semua golongan penduduk), yang memajaki baik orang maupun badan.

Mengingat semakin banyaknya penanaman modal asing di Indonesia sejak 1920, maka timbullah berbagai masalah dalam bidang yuridis fiscal yang mendorong segera dikeluarkan ketentuan tersendiri guna dapat memungut pajak dari badan usaha. Pada tahun 1925 semua ketentuan yang menyangkut pengenaan pajak badan usaha yang terdapat dalam Ordonansi Pajak Pendapatan 1920 dikeluarkan untuk kemudian disusun kembali dalam suatu Ordonansi baru yang diberi nama Ordonansi Pajak Perseroan 1925. Oerdonansi Pajak Perseroan 1925 setelah diadakan perubahan dan penambahan menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 1970.

4. Sejarah Pajak Lainnya

    - Pajak Rumah Tangga 1908 dalam Undang-Undang Pajak Rumah Tangga 1908 yang kemudian diubah menjadi UU No. 2 Tahun 1953 dalam Lembaran Negara RI No. 5 tahun 1953. Dasar pengenaan pajak ini adalah nilai sewa dan bangunan, nilai perabot, sepada motor, dan mobil.

- Pajak Verponding Indonesia tahun 1923 (*Verponding Indonesia 1923, Staatsblads 1927 No. 151*). Pemungutan ditentukan oleh gubernur jenderal dalam batas-batas atau bagian tempat yang ditunjuk oleh gubernur jenderal tadi dari tanah-tanah termasuk juga kolam dan nipah dengan hak milik Indonesiadan dengan hak eigendom atau tanah milik partikelir.
- Ordonansi Pajak Kekayaan 1932, dimana objeknya adalah emas/ logam mulia, mutiara, permata, rumah, tanah, pakaian, dan bahan makanan.
- Ordonansi Verponding Indonesia 1928, objek pajaknya adalah barang-barang tak gerak, tanah dan hasilnya, serta rumah atau bangunan tak bergerak.
- Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934, kemudian melalui PERPU No. 376 tahun 1959 diubah dan ditambah sesuai dengan undang-undang seperti adanya saat ini.
- Ordonansi Pajak Upah 1935 (*Wages Tax Ordinance 1935*).
- Ordonansi Pajak Potong 1936.
- Ordonansi Pajak Bumi 1939 yang berasal dari peraturan tentang Ordonansi Landrente 1907.
- Ordonansi Pajak Jalan 1942.
- Ordonansi Pajak Radio 1947 (UU No. 12 Tahun 1947), kemudian diubah dan ditambah menjadi UU No. 2 Tahun 1959.

- Pajak Pembangunan I tahun 1947 (UU No. 14 Tahun 1947).
- Pajak Kopra 1949, khusus berlaku untuk Indonesia Timur.
- UU Pajak Penjualan 1951 sebagai pengganti UU Pajak Peredaran (UU Darurat No. 12 Tahun 1950).
- Ordonansi Pajak Bangsa Asing 1957, yang tidak mempunyai kewarganegaraan Indonesia maka dikenakan pajak ini.

4.1.2 Modernisasi Pajak Indonesia

4.1.2.1 Era Pra Modernisasi Perpajakan

Dalam sejarah reformasi perpajakan tercatat bahwa DJP telah melakukan reformasi besar-besaran pertama kali pada tahun 1983 dengan merubah sistem pemungutan pajak dari semula *Official Assessment System* menjadi *Self Assesment System* yang pada waktu itu Kantor Pajak masih dinamakan Kantor Inspeksi Pajak. Kemudian pada tahun 1989, Kantor Inspeksi Pajak diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang menjalankan fungsi pelayanan untuk jenis Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sedangkan KP. PBB (Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan) berfungsi sebagai kantor pelayanan untuk jenis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB).

Fungsi pemeriksaan dijalankan oleh Karikpa (Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak) yang sebelum tahun 1994 disebut Unit Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (UP3) dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi

Perpajakan (KP-4) yang sebelum tahun 2001 disebut Kantor Penyuluhan sebagai fungsi penyuluhan.

Stuktur organisasi pada fungsi pelayanan di KPP Pra Modern berdasarkan jenis pajak seperti Seksi PPh Badan, PPh Perseorangan, PPh Pemotongan Pemungutan, dan PPN. Pada struktur ini fungsi pelayanan dilakukan oleh KPP namun pemeriksaan juga dilaksanakan oleh KPP selain Karikpa, Fungsional Kanwil, dan Fungsional Kantor Pusat DJP sehingga terjadi fungsi ganda. Begitu juga dengan pelayanan tidak bersifat satu atap (*one stop service*) karena mengingat jenis pajak PPh dan PPN diadministrasikan oleh KPP sedangkan jenis pajak PBB dan BPHTB oleh KP. PBB. Pengajuan keberatan sebelum modern diproses di KPP disamping Kanwil dan Kantor Pusat DJP, hal ini memunculkan dualisme fungsi, karena yang memeriksa adalah KPP dan proses penyelesaian keberatan juga dilakukan di KPP untuk aristasi KPP. Hal inilah yang mendorong dibentuknya KPP Modern.

4.1.2.2 Era Modernisasi Pajak

Untuk memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih baik, DJP memerlukan dukungan teknologi informasi yang memadai. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan organisasi DJP, Sistem Informasi Perpajakan (SIP), yang digunakan sejak tahun 1994, sudah tidak memadai untuk melayani dan mengawasi Wajib Pajak secara menyeluruh. Oleh karena itu dalam pembentukan Kanwil dan KPP WP Besar pada tahun 2002, SIP dikembangkan

menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang berbasis struktur organisasi berdasarkan fungsi.

Selain itu, masih terdapat kelemahan dalam sistem pelaporan Wajib Pajak yaitu pelaporan secara manual mengharuskan fiskus untuk melakukan perekaman ulang yang rawan kesalahan serta memerlukan sumber daya yang tidak sedikit. Melalui pengembangan teknologi informasi, DJP mengembangkan beberapa program yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak berupa e-SPT dan e-Filing. Dalam sistem pembayaran pajak juga ditemukan beberapa masalah antara lain pemalsuan Surat Setoran Pajak (SSP). Untuk mencegah hal ini, DJP mengembangkan sistem pembayaran secara elektronik yang dikenal dengan sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3).

Reformasi di bidang administrasi perpajakan terus berlanjut, dan pada tahun 2001 DJP mengusulkan program reformasi yang dapat meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan, yang pada gilirannya dapat menghasilkan tambahan penerimaan pajak. Program reformasi dimaksud menjadi landasan bagi program reformasi yang lebih luas di tahun-tahun mendatang.

- **Langkah – Langkah Modernisasi Pajak**

Dalam melaksanakan modernisasi dalam bidang perpajakan, berikut ini adalah langkah-langkah yang ditempuh oleh Direktorat Jenderal Pajak :

1. Reformasi Ketentuan Peraturan Perpajakan

   Salah satu Reformasi perpajakan jilid pertama yaitu reformasi bidang peraturan perpajakan. Hasilnya berupa diundangkannya UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan UU No.

36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan melalui proses panjang dan melibatkan stake holder termasuk pengusaha yang mencerminkan keadilan dan kesetaraan kedudukan antara fiskus dan Wajib Pajak. Penurunan tarif, penekanan cost of compliance, law enforcement yang lebih tegas kepada Wajib Pajak tidak patuh, kesataraan fiskus dan Wajib Pajak merupakan poin-poin dalam tax reform UU PPh.

Penghapusan sanksi administrasi bunga bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan ketidakbenaran pelaporan PPh tahun pajak 2007 ke bawah, paling lambat dilakukan akhir tahun 2008, merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah dalam UU KUP baru. Program ini disebut *sunset policy* yang diatur dalam pasal 37 A UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP. *Sunset policy* juga diberikan kepada WP OP yang secara sukarela mendaftarkan diri ber-NPWP bila melaporkan kekurangan pajak untuk tahun pajak sebelum ber-NPWP. Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas ini juga tidak akan diperiksa sepanjang tidak ada data /keterangan yang menunjukkan ketidakbenaran pelaporan Wajib Pajak.

2. Reformasi Organisasi

Dalam struktur yang modern ini terdapat perbedaan yang cukup radikal dan signifikan yakni yang dulunya struktur organisasi KPP Pra Modern berdasarkan jenis pajak diubah menjadi berdasarkan fungsi guna debirokratisasi pelayanan seperti Seksi Pelayanan dan Seksi Pemeriksaan dibentuk secara terpisah. Pelayanan perpajakanpun sudah mulai satu atap (one stop service) karena semua jenis pelayanan perpajakan baik jenis pajak PPh,

PPN, PBB, dan BPHTB dilakukan di KPP Pratama sedangkan untuk KPP WP Besar dan KPP Madya hanya jenis pajak PPh dan PPN, sehingga menyebabkan adanya peleburan KP.PBB ke KPP Pratama. Proses penyelesaian keberatan hanya ada di tingkat Kanwil, mengingat di Kanwil tidak menjalankan fungsi pemeriksaan lagi karena fungsi pemeriksaan sepenuhnya dilaksanakan oleh KPP Modern yang menyebabkan pula dileburnya Karikpa ke KPP Modern.

Keunggulan :

1. Adanya pemisahan fungsi yang lebih jelas antara fungsi pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, keberatan, dan pembinaan; Fungsi pelayanan dan pengawasan berada pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi, dan fungsi pemeriksaan berada pada Fungsional Pemeriksa Pajak, sedangkan pada organisasi KPP lain fungsi-fungsi tersebut dilaksanakan dalam suatu seksi tertentu.
2. Fungsi pelayanan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak lebih efektif karena dilakukan melalui mediator khusus yaitu *Account Representative* (AR); Setiap Wajib Pajak memiliki AR khusus.
3. Proses pelaksanaan pekerjaan baik untuk pelayanan, pengawasan, maupun pemeriksaan menjadi lebih efisien dan mengurangi birokrasi sehingga cost of compliance relatif lebih rendah; Dengan adanya AR maka penanganan atas berbagai aspek perpajakan akan menjadi lebih cepat dan dapat dimonitor.
4. Manajemen pemeriksaan lebih efisien dan efektif karena berada dalam satu unit dan SDM dispesialisasikan pada sektor tertentu; Karena

fungsi pemeriksaan dan fungsi lainnya berada dalam satu unit maka koordinasi fungsi tersebut lebih baik, dan karena fungsi pemeriksaan difokuskan kepada sektor-sektor usaha tertentu maka hasil pemeriksaan akan lebih efektif dengan treatment perpajakan yang seragam.

3. Reformasi SDM

Reformasi bidang SDM sebenarnya juga sudah dimulai melalui Reformasi Etika, Moral, Integritas pada Tahun 2002. Namun, dalam rangka mewujudkan visi dan misi Ditjen Pajak, peningkatan mutu dan militansi pegawai mutlak diperlukan. Dengan demikian, kombinasi dari integritas (moral, etika) yang baik dan kemampuan (mutu dan militansi) yang cemerlang merupakan nilai [value] yang harus dimiliki oleh setiap pegawai Ditjen Pajak.

Salah satu alat yang dapat digunakan adalah instrumen *Individual Key Perfomance Indicator*, di mana setiap individu (pegawai) di Ditjen Pajak dapat diukur kinerjanya dengan menggunakan ukuran atau standar yang baku (terukur dan jelas). *Tool* lainnya adalah *work load analysis* (Analisis Beban Kerja) untuk mengukur efisiensi dan efektivitas kerja unit organisasi atau pemangku jabatan berdasarkan volume kerja.

Instrumen ini akan semakin mudah diimplementasikan karena penyusunan *Standard Operating Procedures* (SOP) setiap pekerjaan di Ditjen Pajak telah selesai dilakukan. Dengan membandingkan hasil kerja pegawai dengan SOP-nya, maka secara sederhana pegawai tersebut telah dapat dinilai kinerja individunya.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Kualitatif (Metode Deskriptif)

4.2.1.1 Analisis Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

Untuk menghitung angka-angka PDB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu :

1. Menurut Pendekatan Produksi

   PDB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor) yaitu :

   1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
   2. Pertambangan dan Penggalian
   3. Industri Pengolahan

4. Listrik, Gas dan Air Bersih
5. Konstruksi
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran
7. Pengangkutan dan Komunikasi
8. Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan
9. Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah.

2. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

3. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari :

1. pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba
2. pengeluaran konsumsi pemerintah
3. pembentukan modal tetap domestik bruto
4. perubahan inventori, dan
5. ekspor neto (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir

yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

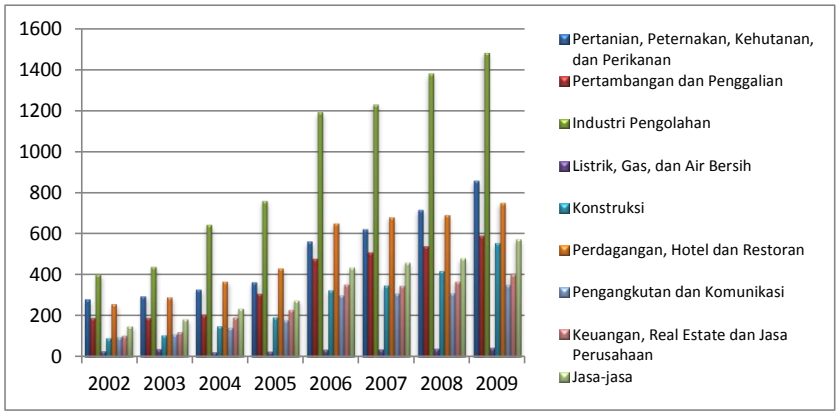
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan produksi atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha, adapun informasi mengenai pertumbuhan PDB di Indonesia dapat dilihat dalam laporan Badan Pusat Statistik yang dilaporkan setiap tahun. Besarnya PDB dari laporan tersebut selama tahun 2002 sampai 2009 dapat dilihat dari tabel 4.9 sebagai berikut :

Tabel 4.9
Perkembangan dan Pertumbuhan PDB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2002 – 2009
(Triliun Rupiah)

LAPANGAN USAHA	TAHUN							
	2002	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan (% terhadap PDB) (Perkembangan, Pertumbuhan)	281,33 17,5%	296,2 16,6% (14,87 tr; 5,3%)	329,12 14,3% (32,92 tr,;11,1%)	364,17 13,1% (35,05 tr; 10,6%)	563,22 13% (199,05 tr; 54,7%)	622,93 13,7% (59,71 tr; 10,6%)	716,06 14,5% (93,13tr; 15%)	858,25 15,3% (142,19tr; 19,9%
2. Pertambangan & Penggalian (% terhadap PDB) (Perkembangan, Pertumbuhan)	191,83 11,9%	191,2 10,7% (-0,63 tr; -0,3%)	205,25 8,9% (14,05 tr; 7,3%)	309,01 11,1% (103,76 tr; 50,6%)	478,52 11% (169,51 tr; 54,9%)	510,61 11,2% (32,09 tr; 6,7%)	540,61 10,9% (30 tr; 5,9%)	591,53 10,5% (50,92 tr; 9,4%
3. Industri Pengolahan (% terhadap PDB) (Perkembangan, Pertumbuhan)	402,60 25%	440,5 24,7% (37,90 tr; 9,4%)	644,34 28,1% (203,84 tr; 46,3%)	760,36 27,4% (116,02 tr; 18%)	1.192,53 27,5% (432,17 tr; 56,8%)	1.228,65 27% (36,12 tr; 3%)	1.380,71 27,9% (152,06 tr; 12,4%)	1.480,91 26,4% (100,20 tr; 7,3%)
4. Listrik, Gas & Air Bersih (% terhadap PDB) (Perkembangan, Pertumbuhan)	29,10 1,8%	39,7 2,2% (10,60 tr; 36,4%)	23,73 1% (-15,97 tr; -40,2%)	26,69 1% (2,96 tr; 12,5%)	37,35 0,9% (10,66 tr; 39,9%)	38,72 0,9% (1,37 tr; 3,7%)	40,85 0,8% (2,13 tr; 5,5%	46,82 0,8% (5,97 tr; 14,6%)
5. Konstruksi (% terhadap PDB) (Perkembangan, Pertumbuhan)	92,37 5,7%	107,1 6% (14,73 tr; 15,9%)	151,25 6,6% (44,15 tr; 41,2%)	195,11 7% (43,86 tr; 29%)	325,13 7,5% (130,02 tr; 66,6%)	349,99 7,7% (24,86 tr; 7,6%)	419,64 8,5% 69,65 tr; 19,9 %)	554,98 9,9% (135,34 tr; 32,3%)
6. Perdagangan, Hotel & Restoran (% terhadap PDB) (Perkembangan, Pertumbuhan)	258,87 16,1%	291,6 16,3% (32,72 tr; 12,6%)	368,56 16,1% (76,96tr ; 26,4%)	431,62 15,6% (63,03tr ; 17,1%)	651,54 15% (219,92tr ; 51%)	680,86 15% (29,32tr ; 4,5%)	691,49 14% (10,63tr ; 1,6%)	750,61 13,4% (69,12tr ; 8,5%)
7. Pengangkutan dan Komunikasi (% terhadap PDB) (Perkembangan, Pertumbuhan)	97,34 6%	111,7 6,3% (14,36tr ; 14,8%)	142,29 6,2% (30,59tr ; 27,4%)	180,58 6,5% (38,29tr ; 26,9%)	301,52 6,9% (120,94tr ; 67%)	310,26 6,7% (8,74tr : 2,9%)	312,19 6,3% (1,93tr ; 0,6%)	352,41 6,3% (40,22tr ; 12,9%)
8. Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan (% terhadap PDB) (Perkembangan, Pertumbuhan)	105,62 6,6%	123,0 6,9% (17,38tr ; 16,5%)	194,41 8,5% (71,41tr ; 58,1%)	230,52 8,3% (36,11tr ; 18,6%)	353,13 8,1% (122,63tr ; 53,2%)	348,21 7,7% (-4,94tr ; -1,4%)	368,13 7,4% (19,92tr ; 5,7%)	404,12 7,2% (35,99tr ; 9,8%)
9. Jasa-jasa (% terhadap PDB) (Perkembangan, Pertumbuhan)	150,96 9,4%	185,7 10,4% (34,73tr ; 23%)	236,87 10.3% (51,17tr ; 27,6%)	276,20 10% (39,33tr ; 16,6%)	436,26 10,1% (160,06tr ; 58%)	460,66 10,1% (24,40tr ; 5,6%)	481,67 9,7% (21,01tr ; 4,6%)	573,82 10,2% (92,15tr ; 19,1%)
PDB	**1.610,01**	**1.786,7**	**2.295,83**	**2.774,28**	**4.339,22**	**4.550,89**	**4.951,36**	**5.613,44**
PDB Tanpa Migas	**1.421,68**	**1.594,9**	**2.083,08**	**2.458,23**	**3.967,04**	**4.234,41**	**4.427,19**	**5.146,51**

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2009

Dari tabel 4.9 tersebut, untuk mempermudah dalam memahami pertumbuhan atau kenaikan/penurunan setiap sektor dalam Produk Domestik Bruto (PDB), maka penulis menggambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut:



Gambar 4.6
Grafik Produk Domestik Bruto (PDB)
Tahun 2002-2009 menurut Lapangan Usaha/ Sektoral

Penjelasan dari grafik Produk Domestik Bruto per tahun menurut lapangan usaha adalah sebagai berikut :

- Tahun 2002

Pada tahun ini Produk Domestik Bruto mencapai Rp. 1610,01 triliun dengan jumlah Produk Domestik Bruto tanpa Migas sebesar Rp. 1.421,68 triliun. Hal ini didukung oleh seluruh sektor ekonomi. Berikut ini adalah uraian mengenai Produk Domestik Bruto dari masing-masing sektoral :

1. Sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan memiliki kontribusi 17,5% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 281,33 triliun. Kontribusi dalam sektor ini terutama terjadi pada subsektor tanaman bahan makanan melalui peningkatan produktivitas dan perluasan lahan pertanian.

2. Sektor pertambangan dan penggalian memiliki kontribusi 11,9% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 191,83 triliun. Hal ini terutama ditopang oleh subsektor pertambangan nonmigas yang mengalami peningkatan produksi yaitu batubara, timah, tembaga, nikel, dan aluminium.
3. Sektor industri pengolahan memiliki kontribusi 25% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 402,60 triliun. Pada sektor ini, khususnya industri elektronika serta industri kimia, agro dan hasil hutan telah mengalami peningkatan. Indikator lain seperti produksi sepeda motor juga masih berada pada tren yang terus meningkat sejak tahun 1998.
4. Sektor listrik, gas dan air bersih memiliki kontribusi 1,8% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 29,1 triliun. Pertumbuhan sektor ini terutama karena daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.
5. Sektor konstruksi memiliki kontribusi 5,7% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 92,37 triliun. Kontribusi dalam sektor ini terutama berasal dari perbaikan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah seiring dengan pelaksanaan proyek-proyek besar pembangunan jalan di berbagai daerah di Indonesia serta pembangunan properti komersial dan residensial.
6. Sektor perdagangan, hotel dan restoran memiliki kontribusi 16,1% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 258,87 triliun. Kontribusi pada sektor ini terutama didorong oleh subsektor perdagangan besar dan eceran seiring dengan peningkatan konsumsi masyarakat. Akan tetapi subsektor hotel dan restoran mengalami perlambatan yang disebabkan oleh tragedi Bali yang menyebabkan merosotnya kinerja pada subsektor ini.

7. Sektor pengangkutan dan komunikasi memiliki kontribusi 6% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 97,34 triliun. Meski terjadi tragedi Bali, sektor pengangkutan dan komunikasi masih mencatat pertumbuhan yang meningkat. Pertumbuhan yang terjadi terutama berasal dari pertumbuhan pada subsektor pengangkutan, khususnya angkutan jalan raya dan angkutan udara. Pada angkutan udara, bertambahnya maskapai penerbangan udara dan kebijakan pemerintah mendorong persaingan yang semakin ketat sehingga menyebabkan harga tiket pesawat lebih murah. Namun demikian, tragedi Bali telah menyebabkan pertumbuhan kegiatan angkutan udara melambat. Sedangkan untuk subsektor komunikasi, berbagai tawaran program baru dari operator telepon seluler juga berperan dalam peningkatan pertumbuhan subsektor ini.
8. Sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan memiliki kontribusi 6,6% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 105,62 triliun. Kontribusi ini terutama berasal dari dana pihak ketiga dan penyaluran kredit yang mencerminkan proses intermediasi perbankan yang terus membaik.
9. Sektor jasa-jasa memiliki kontribusi 9,4% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 150,96. Sektor ini mengalami pertumbuhan yang positif sejalan dengan pertumbuhan sektor lainnya.

- Tahun 2003

Pada tahun ini, Produk Domestik Bruto mencapai Rp. 1786,7 triliun dengan jumlah Produk Domestik Bruto tanpa Migas sebesar Rp. 1.594,9 triliun. Hal ini didukung oleh hampir seluruh sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan

positif, kecuali pada sektor pertambangan dan penggalian. Berikut ini adalah uraian mengenai Produk Domestik Bruto dari masing-masing sektoral :

1. Sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan memiliki kontribusi 16,6 % terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 296,02 triliun. Sektor ini mengalami perkembangan sebesar Rp. 14,87 triliun atau tumbuh 5,3% dari tahun sebelumnya. Kontribusi dalam sektor ini terutama berasal dari Subsektor Tanaman Bahan Makanan dan Subsektor Tanaman Perkebunan. Untuk Subsektor Tanaman Bahan Makanan, peningkatan terjadi pada produksi padi, jagung, dan ubi kayu. Pertumbuhan Subsektor Perkebunan masih bergantung dari komoditas kelapa sawit, kakao dan karet. Untuk Subsektor Perikanan, pemerintah telah mengeluarkan program untuk mengeliminasi tingkat pencurian ikan melalui pembenahan perizinan penangkapan ikan, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum di laut, pengadilan yang cepat dan berwibawa, serta peningkatan kualitas armada perikanan.
2. Sektor Pertambangan dan penggalian memiliki kontribusi 10,7% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 191,2 triliun. Sektor ini mengalami penurunan sebesar Rp. 0,63 triliun atau 0,3% jika dibandingkan dengan tahun 2002. Kontraksi pada Subsektor Migas terjadi karena adanya perbaikan pada beberapa sumur minyak sehingga menyebabkan penurunan produksi.
3. Sektor industri pengolahan memiliki kontribusi 24,7% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 440,5 triliun. Sektor ini mengalami perkembangan sebesar Rp. 37,90 triliun atau tumbuh 9,4% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan

sektor ini terutama ditopang oleh Subsektor Industri Migas dan Subsektor Industri Nonmigas. Untuk industri nonmigas, membaiknya kinerja yang terjadi merupakan nilai tambah pada industri makanan, minuman dan tembakau.

4. Sektor listrik, gas dan air bersih memiliki kontribusi 2,2% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 39,7 triliun. Sektor ini mengalami perkembangan sebesar Rp. 10,60 triliun atau tumbuh 36,4% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan sektor ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pasokan listrik guna memenuhi kenaikan permintaan akibat aktivitas ekonomi yang meningkat. Tambahan pasokan dari listrik swasta merupakan salah satu sumber pertumbuhan yang terjadi di sektor ini. Di subsektor air bersih, penyediaan air bersih dapat ditingkatkan seiring dengan upaya pembenahan jaringan pipa yang berhasil menurunkan tingkat kebocoran.
5. Sektor Konstruksi memiliki kontribusi 6% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 107,1 triliun. Sektor ini mengalami perkembangan sebesar Rp. 14,73 triliun atau tumbuh 15,9% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan yang relatif tinggi ini berasal dari pembangunan infrastruktur dan prasarana wilayah, seperti pembangunan pelabuhan udara, pembangunan jalan, waduk/irigasi, serta pembangunan properti.
6. Sektor perdagangan, hotel dan restoran memiliki kontribusi 16,3% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 291,6 triliun. Sektor ini mengalami pertumbuhan yang meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 32,73 triliun atau tumbuh 12,6%. Hal ini sejalan dengan

meningkatnya penjualan sepeda motor dan mobil, serta konsumsi semen. Sementara itu, kegiatan pariwisata telah mulai pulih dengan sumber utama berasal dari peningkatan jumlah wisatawan domestik. Namun demikian, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara belum pulih kembali setelah tragedi Bom Bali.

7. Sektor pengangkutan dan komunikasi memiliki kontribusi 6,3% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 111,7 triliun. Sektor ini mengalami perkembangan sebesar Rp. 14,36 triliun atau tumbuh 14,8% dari tahun sebelumnya. Untuk Subsektor Pengangkutan, peningkatan pertumbuhan terutama dari angkutan udara terkait dengan deregulasi tarif angkutan udara yang menyebabkan melonjaknya permintaan. Sementara itu, pertumbuhan angkutan jalan raya yang memiliki pangsa lebih dari 50% dari subsektor pengangkutan perkembangannya relatif stabil. Untuk Subsektor Komunikasi, pertumbuhannya didukung oleh investasi di bidang telekomunikasi yang terus berkembang, terutama untuk jaringan telekomunikasi nirkabel berbasis CDMA dan adanya rencana pemerintah untuk membangun tambahan jaringan telepon tetap (fixed line).
8. Sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan memiliki kontribusi 6,9% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 123 triliun. Sektor ini juga menunjukkan pertumbuhan yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 17,38 triliun atau 16,5%. Kontributor pada pertumbuhan sektor ini berasal dari Subsektor Bank, meski dengan

pertumbuhan kredit yang terbatas namun mampu mencatat peningkatan laba operasional.

9. Sektor jasa-jasa memiliki kontribusi 10,4% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 185,7 triliun. Sektor ini mengalami perkembangan sebesar Rp. 34,74 triliun atau tumbuh 23% dari tahun sebelumnya. Hal ini seiring dengan meningkatnya kegiatan ekonomi dari sektor-sektor produksi lainnya.

- Tahun 2004

Pada tahun ini, Produk Domestik Bruto mencapai Rp. 2.295,83 triliun dengan jumlah Produk Domestik Bruto tanpa Migas sebesar Rp. 2.083,08 triliun. Hal ini didukung oleh hampir seluruh sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan positif, kecuali sektor listrik, gas dan air bersih yang mengalami penurunan. Berikut ini adalah uraian mengenai Produk Domestik Bruto dari masing-masing sektor tersebut :

1. Sektor Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan memiliki kontribusi 14,3% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 329,12 triliun. Sektor ini mengalami perkembangan sebesar Rp 39,92 triliun atau tumbuh 11,1% dari tahun sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan oleh subsektor perikanan yang mengalami peningkatan produksi pada usaha tambak udang.
2. Sektor pertambangan dan penggalian memiliki kontribusi 8,9% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 205,25 triliun. Sektor ini mengalami perkembangan sebesar Rp. 14,05 triliun atau tumbuh 7,3% dari tahun sebelumnya. Hal ini

terutama didorong oleh adanya pengembangan lapangan gas bumi di Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi.

3. Sektor industri pengolahan memiliki kontribusi 28,1% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 644,34 triliun. Sektor ini mengalami perkembangan sebesar Rp. 203,84 triliun atau tumbuh 46,3% dari tahun sebelumnya. Sektor ini mencatat pertumbuhan yang cukup tinggi dibandingkan sektor lainnya. Pertumbuhan sektor ini didorong oleh pertumbuhan pada subsektor industri nonmigas. Tingginya permintaan dalam negeri dan luar negeri telah mendorong tingginya pertumbuhan sektor industri, terutama untuk industri alat angkutan, industri semen, serta industri kimia.
4. Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih memiliki kontribusi 1 % terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 23,73 triliun. Sektor ini mengalami penurunan sebesar Rp. 15,97 triliun atau 40,2% dari tahun sebelumnya.
5. Sektor Konstruksi memiliki kontribusi 6,6% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 151,25 triliun. Sektor ini mengalami perkembangan sebesar Rp. 44,15 triliun atau tumbuh 41,2% dari tahun sebelumnya. Hal ini terjadi sejalan dengan maraknya pembangunan infrastruktur maupun proyek properti selama 2004. Pembangunan ruas jalan tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang, flyover, jalur ganda kereta api Yogyakarta-Kroya maupun pembangunan jembatan dan pelabuhan di beberapa daerah merupakan sebagian contoh dari kegiatan pembangunan infrastruktur selama tahun ini.
6. Sektor perdagangan, hotel dan restoran memiliki kontribusi 16,1% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 368,56 triliun. Sektor ini mengalami

perkembangan sebesar Rp. 76,96 triliun atau tumbuh 26,4% dari tahun sebelumnya.

7. Sektor pengangkutan dan komunikasi memiliki kontribusi 6,2% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 142,29%. Sektor ini mengalami perkembangan sebesar Rp. 30,59 triliun atau tumbuh 27,4% dari tahun sebelumnya.
8. Sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan memiiki kontribusi 8,5% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 194,41 triliun. Sektor ini mengalami perkembangan sebesar Rp. 71,41 triliun atau tumbuh 58,1% dari tahun sebelumnya. Hal ini terutama didukung oleh pertumbuhan pada subsektor bank dan lembaga keuangan nonbank, serta subsektor sewa bangunan. Peningkatan penyaluran kredit oleh perbankan maupun maraknya pembiayaan oleh lembaga keuangan nonperbankan, terutama untuk pembelian kendaraan bermotor, telah mendorong kenaikan nilai tambah pada subsektor ini.
9. Sektor jasa-jasa memiliki kontribusi sebesar 10,3% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 236,87 triliun. Sektor ini mengalami perkembangan sebesar Rp. 51,17 triliun atau tumbuh 27,6% dari tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan kegiatan sektor lainnya yang mengalami pertumbuhan.

- Tahun 2005

Pada tahun ini, Produk Domestik Bruto mencapai Rp. 2.774,28 triliun dengan jumlah Produk Domestik Bruto tanpa Migas sebesar Rp. 2.458,23 triliun. Hal ini didukung oleh seluruh sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan positif .

Berikut ini adalah uraian mengenai Produk Domestik Bruto dari masing-masing sektoral :

1. Sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan memiliki kontribusi sebesar 13,1% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 364,17 triliun. Sektor ini mengalami perkembangan sebesar Rp. 35,05 triliun atau tumbuh 10,6% dari tahun sebelumnya.
2. Sektor Pertambangan dan penggalian memiliki kontribusi 11,1% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 309,01 triliun. Sektor ini mengalami perkembangan sebesar Rp. 103,76 triliun atau tumbuh 50,6% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini ditopang oleh pertumbuhan yang cukup tinggi pada subsektor pertambangan tanpa migas dan subsektor penggalian karena adanya peningkatan permintaan. Sementara itu, untuk subsektor minyak dan gas bumi juga menunjukkan perbaikan. Perbaikan tersebut dipengaruhi oleh upaya-upaya intensif yang dilakukan oleh instansi yang berwewenang sehingga kapasitas produksi tetap tinggi.
3. Sektor industri pengolahan memiliki kontribusi 27,4% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 760,36 triliun. Sektor ini mengalami perkembangan sebesar Rp. 116,02 triliun atau tumbuhn 18% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh subsektor industri makanan, minuman, dan tembakau.
4. Sektor listrik, gas dan air bersih memiliki kontribusi 1% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 26,69 triliun. Sektor ini mengalami perkembangan sebesar Rp. 2,96 triliun atau tumbuh 12,5% dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan pada sektor ini terutama ditopang oleh konsumsi listrik seiring dengan kegiatan ekonomi yang secara umum masih cukup baik.

5. Sektor konstruksi memiliki kontribusi sebesar 7% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 195,11 triliun. Sektor ini mengalami perkembangan sebesar Rp. 43,86 triliun atau tumbuh 29% dari tahun sebelumnya. Hal ini tercermin dari naiknya pertumbuhan penjualan semen, pertumbuhan kredit properti komersial, dan tingginya realisasi proyek pemerintah. Selain itu, di sektor swasta berbagai proyek properti komersial masih mencatat pertumbuhan yang cukup tinggi, seperti apartemen dan pusat perbelanjaan.
6. Sektor perdagangan, hotel dan restoran memiliki kontribusi 15,6% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 431,62 triliun. Sektor ini mengalami perkembangan sebesar Rp. 63,03 triliun atau tumbuh 17,1% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini terutama berasal dari subsektor perdagangan yaitu meningkatnya jumlah pasar modern, baik hypermarket, supermarket, maupun pusat perdagangan modern lainnya.
7. Sektor pengangkutan dan komunikasi memiliki kontribusi 6,5% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 180,58 triliun. Sektor ini mengalami perkembangan sebesar Rp. 38,29 triliun atau tumbuh 26,9% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan yang cukup tinggi tersebut terutama berasal dari pertumbuhan yang tinggi pada subsektor telekomunikasi. Jumlah pelanggan telepon baik seluler maupun *fixed line* yang meningkat di atas 30% mengkonfirmasi kinerja subsektor ini.

8. Sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan memiliki kontribusi 8,3% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 230,52 triliun. Sektor ini mengalami perkembangan sebesar Rp. 36,11 triliun atau tumbuh 18,6% dari tahun sebelumnya.
9. Sektor jasa-jasa memiliki kontribusi 10% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 276,2 triliun. Sektor ini mengalami perkembangan sebesar Rp. 39,33 triliun atau tumbuh 16,6% dari tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan pada sektor lainnya.

- Tahun 2006

Pada tahun ini, Produk Domestik Bruto mencapai Rp. 4.339,22 triliun dengan jumlah Produk Domestik Bruto tanpa Migas sebesar Rp. 3.967,04 triliun. Hal ini didukung oleh seluruh sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan positif. Tahun ini, PDB mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dibanding tahun lainnya, hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat di berbagai sektoral. Berikut ini adalah uraian mengenai Produk Domestik Bruto dari masing-masing sektoral :

1. Sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan memiliki kontribusi 13% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 563,22 triliun. Sektor ini mengalami perkembangan 199,05 triliun atau tumbuh 54,7% dari tahun sebelumnya. Sektor pertanian terutama didorong oleh subsektor tanaman bahan makanan. Sedangkan pada subsektor perkebunan, peningkatan tertinggi terjadi pada komoditas kelapa sawit dan karet.

2. Sektor pertambangan dan penggalian memiliki kontribusi 11% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 478,52 trilun. Sektor ini mengalami perkembangan sebesar Rp. 169,51 triliun atau tumbuh 54,9% dari tahun sebelumnya.
3. Sektor industri pengolahan memiliki kontribusi 27,5% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 1.192,53 triliun. Sektor ini mengalami perkembangan sebesar Rp. 432,17 triliun atau tumbuh 56,8% dari tahun sebelumnya. Sektor ini mulai meningkat sejak pertengahan tahun 2006.
4. Sektor lisrtik, gas dan air bersih memiliki kontribusi 0,9% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 37,35 triliun. Sektor ini mengalami peningkatan sebesar Rp. 10,66 triliun atau tumbuh 39,9% dari tahun sebelumnya.
5. Sektor konstruksi memiliki kontribusi 7,5% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 325,13 triliun. Sektor ini mengalami perkembangan sebesar Rp. 130,02 triliun atau tumbuh 66,6% dari tahun sebelumnya. Kinerja pada sektor ini antara lain dipengaruhi dari peningkatan jumlah areal lahan industri dan apartemen yang tumbuh tinggi. Selain itu, beberapa proyek infrastruktur Pemerintah yang sedang dalam tahap pembangunan seperti jalan tol, air minum dan bandara juga mempengaruhi kondisi ini.
6. Sektor perdagangan, hotel dan restoran memiliki kontribusi 15% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 651,54 triliun. Sektor ini mengalami perkembangan sebesar Rp. 219,92 triliun atau tumbuh 51% dari tahun sebelumnya.
7. Sektor pengangkutan dan komunikasi memiliki kontribusi 6,9% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 301,52 triliun. Sektor ini mengalami perkembangan sebesar Rp. 120,94 triliun atau tumbuh 67% dari tahun sebelumnya. Hal

ini terutama didorong subsektor komunikasi sejalan dengan jumlah pelanggan telepon seluler yang masih tumbuh tinggi. Sementara itu, pertumbuhan sektor pengangkutan relatif stabil. Kondisi ini antara lain tercermin pada pertumbuhan penumpang kereta api dan angkutan udara yang meningkat dibandingkan tahun lalu.

8. Sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan memiliki kontribusi 8,1% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 353,13 triliun. Sektor ini mengalami perkembangan sebesar Rp. 122,63 triliun atau tumbuh 53,2% dari tahun sebelumnya. Hal ini tercermin pada pertumbuhan kredit yang disalurkan ke sektor perdagangan.
9. Sektor jasa-jasa memiliki kontribusi 10,1% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 436,26 triliun. Sektor ini mengalami perkembangan sebesar Rp. 160,06 triliun atau tumbuh 58% dari tahun sebelumnya. Hal ini seiring dengan peningkatan pada sektor-sektor lainnya.

- Tahun 2007

Pada tahun ini, Produk Domestik Bruto mencapai Rp. 4.550,89 triliun dengan jumlah Produk Domestik Bruto tanpa Migas sebesar Rp. 4.234,41 triliun. Hal ini didukung oleh hampir seluruh sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan positif kecuali sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan yang mengalami penurunan. Berikut ini adalah uraian mengenai Produk Domestik Bruto dari masing-masing sektoral :

1. Sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan memiliki kontribusi 13,7% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 622,93 triliun. Sektor ini

mengalami perkembanga sebesar Rp. 59,71 triliun atau tumbuh 10,6% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini terutama bersumber dari subsektor tanaman bahan makanan khususnya padi, yang merupakan penopang utama pertumbuhan sektor pertanian yang berasal dari kenaikan produktivitas di wilayah Jawa dan perluasan lahan pertanian di luar Jawa. Sementara itu, kenaikan produksi karet dan kelapa sawit juga mendukung pertumbuhan dalam sektor ini.

2. Sektor pertambangan dan penggalian memiliki kontribusi 11,2% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 510,61 triliun. Sektor ini mengalami perkembangan sebesar Rp. 32,09 triliun atau tumbuh 6,7% dari tahun sebelumnya. Hal terutama didorong oleh pertumbuhan subsektor nonmigas yaitu pada komoditas batubara dan bijih nikel.
3. Sektor industri pengolahan memiliki kontribusi 27% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 1.228,65 triliun. Sektor ini mengalami perkembangan sebesar Rp. 36,12 triliun atau tumbuh 3% dari tahun sebelumnya. Hal ini terutama didorong oleh pertubuhan pada subsektor industri makanan, minuman, dan tembakau serta subsektor tekstil, barang dari kulit dan alas kaki.
4. Sektor listrik, gas dan air bersih memiliki kontribusi 0,9% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 38,72 triliun. Sektor ini mengalai perkembangan sebesar Rp. 1,37 triliun atau tumbuh 3,7%.
5. Sektor konstruksi memiliki kontribusi 7,7% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 349,99 triliun. Sektor ini mengalami perkembangan sebesar Rp. 24,86 triliun atau tumbuh 7,6% dari tahun sebelumnya. Sektor ini meningkat

sejalan dengan pertumbuhan investasi bangunan. Peningkatan pertumbuhan sektor konstruksi ini terkait dengan keyakinan investor terhadap perbaikan daya beli masyarakat serta berbagai upaya Pemerintah dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur.

6. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran memiliki kontribusi 15% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 680,86 triliun. Sektor ini mengalami perkembangan sebesar Rp. 29,32 triliun atau tumbuh 4,5% dari tahun sebelumnya. Hal ini ditunjang oleh subsektor hotel dan restoran yang tercermin pada tingkat hunian hotel serta jumlah wisatawan mancanegara.
7. Sektor pengangkutan dan komunikasi memiliki kontribusi 6,8% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 310,26 triliun. Sektor ini mengalami perkembangan sebesar Rp. 8,74 triliun atau tumbuh 2,9% dari tahun sebelumnya. Petumbuhan ini terutama didorong oleh subsektor komunikasi sejalan dengan semakin ketatnya persaingan antaroperator telepon. Hal ini berdampak pada semakin gencarnya inovasi dan ekspansi usaha sehingga mempengaruhi kenaikan pertumbuhan jumlah penggunaan telepon, khususnya telepon seluler.
8. Sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan memiliki kontribusi 7,7% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 348,21 triliun. Sektor ini mengalami penurunan sebesar Rp. 4,94 triliun atau 1,4% dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena tingginya tingkat suku bunga sehingga jumlah kredit yang disalurkan menjadi turun.

9. Sektor jasa-jasa memiliki kontribusi 10,1 % terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 460,66 triliun. Sektor ini mengalami perkembangan sebesar Rp. 24,40 triliun atau tumbuh 5,6% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan sektor ini masih sejalan dengan pertumbuhan pada sektor lainnya.

- Tahun 2008

Pada tahun ini, Produk Domestik Bruto mencapai Rp. 4.951,36 triliun dengan jumlah Produk Domestik Bruto tanpa Migas sebesar Rp. 4.427,19 triliun. Hal ini didukung oleh seluruh sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan positif. Berikut ini adalah uraian mengenai Produk Domestik Bruto dari masing-masing sektoral :

1. Sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan memiliki kontribusi 14,5% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 716,06 triliun. Sektor ini mengalami perkembangan Rp. 93,13 triliun atau tumbuh 19,9% dari tahun sebelumnya. Kinerja sektor pertanian masih ditopang oleh subsektor perkebunan dan tanaman bahan makanan. Kinerja sektor pertanian yang membaik terutama disebabkan oleh membaiknya produktivitas subsektor tanaman bahan makanan yang bersumber dari peningkatan produksi pertanian selama tahun 2008 terutama di wilayah Jawa dan Sumatera. Di samping itu, kinerja sektor pertanian tersebut didukung oleh tingginya permintaan ekspor subsektor perkebunan terutama kelapa di Sumatera dan Kalimantan.
2. Sektor pertambangan dan penggalian memiliki kontribusi 10,9% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 540,61 triliun. Sektor ini mengalami perkembangan

sebesar Rp. 30 triliun atau tumbuh 5,9% dari tahun sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan oleh subsektor migas yang tumbuh positif akibat meningkatnya permintaan masyarakat.

3. Sektor industri pengolahan memiliki kontribusi 27,9% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 1.380,71 triliun. Sektor ini mengalami perkembangan sebesar Rp. 152,06 triliun atau tumbuh 12,4% dari tahu sebelumnya. Hal ini disebabkan karena meningkatnya daya beli masyarakat terutama untuk barang tahan lama.
4. Sektor listrik, gas dan air bersih memiliki kontribusi 0,8% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 40,85 triliun. Sektor ini mengalami perkembangan sebesar Rp. 2,13 triliun atau tumbuh 5,5% dari tahun sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan karena kuatnya permintaan domestik.
5. Sektor konstruksi memiliki kontribusi 8,5% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 419,64 triliun. Sektor ini mengalami peningkatan sebesar Rp. 69,65 triliun atau tumbuh 19,9% dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh kuatnya daya beli dan pembangunan konstruksi diberbagai wilayah.
6. Sektor perdagangan, hotel dan restoran memiliki kontribusi 14% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 691,49 triliun. Sektor ini mengalami perkembangan sebesar Rp. 10,63 triliun atau tumbuh 1,6% dari tahun sebelumnya.
7. Sektor pengangkutan dan komunikasi memiliki kontribusi 6,3% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 368,13 triliun. Sektor ini mengalami perkembangan sebesar Rp. 1,93 triliun atau tumbuh 0,6% dari tahun sebelumnya.

8. Sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan memiliki kontribusi 7,4% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 368,13 triliun. Sektor ini mengalami perkembangan sebesar Rp. 19,92 triliun atau tumbuh 5,7% dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena meningkatnya pinjaman kepada pihak ketiga.
9. Sektor jasa-jasa memiliki kontribusi 9,7% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 481,67 triliun. Sektor ini mengalami perkembangan sebesar Rp. 21,01 triliun atau tumbuh 5,7% dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya daya beli dan jumlah pinjaman.

- Tahun 2009

Pada tahun ini, Produk Domestik Bruto mencapai Rp. 5.613,44 triliun dengan jumlah Produk Domestik Bruto tanpa Migas sebesar Rp. 5.146,51 triliun. Hal ini didukung oleh seluruh sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan positif. Berikut ini adalah uraian mengenai Produk Domestik Bruto dari masing-masing sektoral :

1. Sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan memiliki kontribusi 15,3% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 858,25 triliun. Sektor ini mengalami perkembangan sebesar Rp. 142,19 triliun atau tumbuh 19,9% dari tahun sebelumnya. Hal ini terutama didorong oleh subsektor tanaman bahan makanan di antaranya padi, jagung, dan kedelai yang didukung oleh peningkatan luas areal tanam serta kondisi iklim. Pada subsektor perkebunan, peningkatan tertinggi terjadi pada komoditas kelapa sawit dan karet yang antara lain didorong peningkatan permintaan ekspor.

2. Sektor pertambangan dan penggalian memiliki kontribusi 10,5% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 591,53 triliun. Sektor ini mengalami perkembangan sebesar Rp. 50,92 triliun atau tumbuh 9,4% dari tahun sebelumnya.
3. Sektor industri pengolahan memiliki kontribusi 26,4% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 1.480,91 triliun. Sektor ini mengalami perkembangan sebesar Rp. 100,20 triliun atau tumbuh 7,3% dari tahun sebelumnya.
4. Sektor listrik, gas dan air bersih memiliki kontribusi 0,8% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 46,82 triliun. Sektor ini mengalami perkembangan sebesar Rp. 5,97 triliun atau tumbuh 14,6% dari tahun sebelumnya. Sektor ini mengalami peningkatan yang signifikan karena meningkatnya permintaan LPG terkait dengan kebijakan pemerintah mengenai program konversi minyak tanah ke LPG.
5. Sektor konstruksi memiliki kontribusi 9,9% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 555,98 triliun. Sektor ini mengalami perkembangan sebesar Rp. 135,34 triliun atau tumbuh 32,3% dari tahun sebelumnya. Sektor ini mengalami pertumbuhan yang tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan dari pertumbuhan kredit properti komersial, yang tercermin dari sektor swasta dengan berbagai proyeknya.
6. Sektor perdagangan, hotel dan restoran memiliki kontribusi 13,4% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 750,61 triliun. Sektor ini mengalami perkembangan sebesar Rp. 59,12 triliun atau tumbuh 8,5% dari tahun sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan oleh kegiatan perdagangan luar negeri.

7. Sektor pengangkutan dan komunikasi memiliki kontribusi 6,3% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 352,41 triliun. Sektor ini mengalami perkembangan sebesar Rp. 40,22 triliun atau tumbuh 12,9% dari tahun sebelumnya. Sektor ini mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi terutama masih dipengaruhi oleh daya beli masyarakat pada subsektor komunikasi.
8. Sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan memiliki kontribusi 7,2% terhadap PDB yaitu sebesar Rp. 404,12 triliun. Sektor ini mengalami perkembangan sebesar Rp. 35,99 triliun atau tumbuh 9,8% dari tahun sebelumnya.
9. Sektor jasa-jasa memiliki kontribusi 10,2% terhadap PDB yaitu sebesar Rp 573,82 triliun. Sektor ini mengalami perkembangan sebesar Rp. 92,15 triliun atau tumbuh 19,1% dari tahun sebelumnya. Sektor ini mangalami pertumbuhan yang meningkat sejalan dengan pertumbuhan produksi pada sektor lainnya. Pertumbuhan sektor ini ditunjang oleh peningkatan nilai tambah sejalan dengan semakin berkembangnya kegiatan usaha informal. Perbaikan kinerja sektor-sektor ekonomi tersebut didukung pula oleh perbaikan di sisi pemanfaatan faktor produksi.

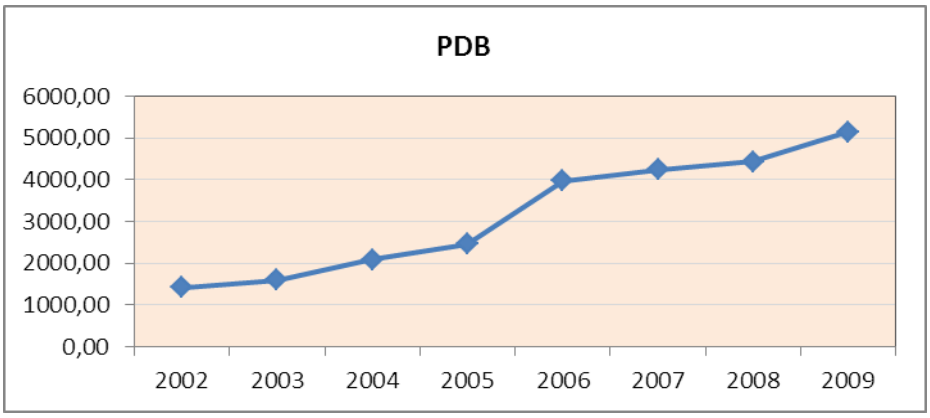
Dari penjelasan diatas, diperoleh gambaran Produk Domestik Bruto pada Indonesia sebagai berikut.

Tabel 4.10
Perkembangan Produk Domestik Bruto Indonesia

Tahun	PDB	Perkembangan	Pertumbuhan
2002	1421.68	-	-
2003	1594.90	173.22	12.18%
2004	2083.08	488.18	30.61%

Tahun	PDB	Perkembangan	Pertumbuhan
2005	2458.23	375.15	18.01%
2006	3967.04	1508.81	61.38%
2007	4234.41	267.37	6.74%
2008	4427.19	192.78	4.55%
2009	5146.51	719.32	16.25%
	Rata-Rata	**532.12**	**21.39%**

Pada tabel 4.10 dapat dilihat Produk Domestik Bruto Indonesia rata-rata mengalami peningkatan sebesar 532.12 triliun rupiah setiap tahunnya dengan pertumbuhan sekitar 21,39% setiap tahunnya. Secara visual perkembangan Produk Domestik Bruto di Indonesia dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 4.7
Grafik Perkembangan Produk Domestik Bruto Indonesia

Pada gambar 4.7 terlihat dengan jelas bahwa Produk Domestik Bruto di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan Produk Domestik Bruto di Indonesia paling tinggi terjadi pada tahun 2006, yaitu mengalami pertumbuhan sekitar 61,38%. Sebaliknya peningkatan Produk Domestik Bruto yang terkecil terjadi dari tahun 2007 ke tahun 2008 yang hanya mengalami pertumbuhan sekitar 4,55%. Pada pertumbuhannya tidak semua sektor

mengalami pertumbuhan yang signifikan, selain itu kontribusi setiap sektor terhadap PDB sangat fluktuatif setiap tahunnya bahkan pada tahun 2009 mengalami penurunan seperti sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan.

4.2.1.2 Analisis Jumlah Wajib Pajak di Indonesia

Sebuah sistem di suatu negara akan berjalan lancar bila masyarakat ikut serta memberikan kontribusi. Kontribusi yang bisa dilakukan secara nyata oleh masyarakat dalam hal perpajakan adalah membayar pajak, yang kemudian pembayar pajak ini dikenal dengan istilah Wajib Pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam perpajakan Indonesia, terdapat tiga jenis wajib pajak, yaitu :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi, yaitu merupakan pengusaha yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.
2. Wajib Pajak Badan, yaitu merupakan badan usaha yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang

tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

3. Wajib Pajak Bendaharawan, yaitu merupakan Bendaharawan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah, Lembaga Negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Luar Negeri, yang membayar gaji, upah, tunjangan, hororarium dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan.

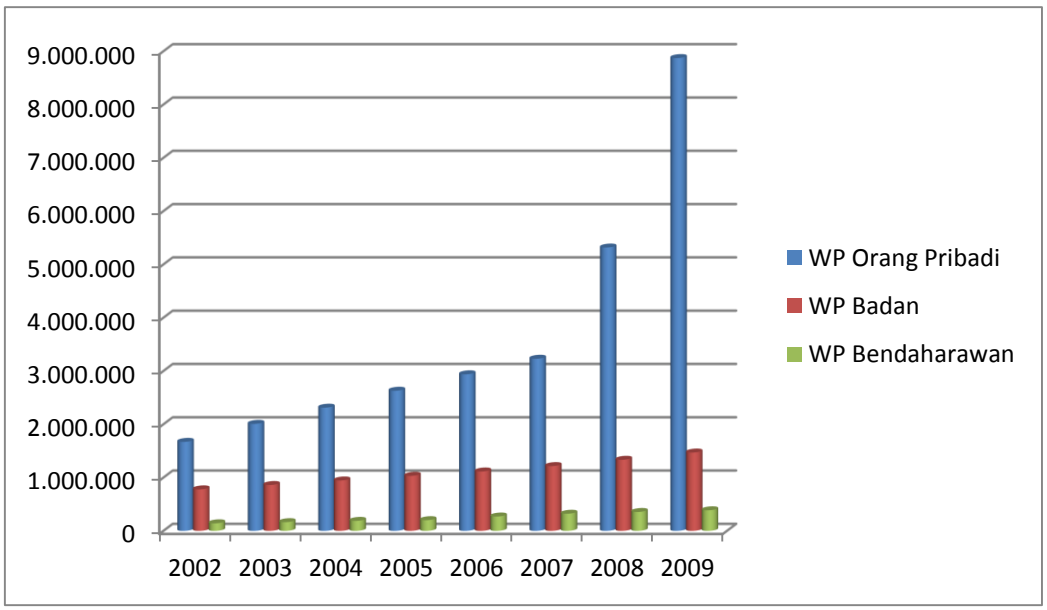
Dalam penelitian ini, penulis mengungkapkan semua jenis wajib pajak yang meliputi wajib pajak Orang Pribadi, wajib pajak Badan, dan wajib pajak Bendaharawan yang terdaftar di Indonesia. Adapun informasi mengenai jumlah wajib pajak di Indonesia selama tahun 2002 sampai 2009 dapat dilihat dari tabel 4.11 sebagai berikut :

Tabel 4.11
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Di Indonesia (Per Jenis)

Tahun	Total Wajib Pajak Orang Pribadi	Total Wajib Pajak Badan	Total Wajib Pajak Bendaharawan	TOTAL WAJIB PAJAK
2002	1.670.383	778.915	141.958	**2.591.256**
2003	2.007.861	860.504	163.600	**3.031.965**
2004	2.311.525	945.791	187.775	**3.445.091**
2005	2.629.833	1.032.557	200.995	**3.863.385**
2006	2.937.738	1.114.688	269.382	**4.321.808**
2007	3.229.705	1.215.906	321.630	**4.767.241**
2008	5.316.685	1.333.806	354.774	**7.005.265**
2009	8.872.009	1.470.116	386.353	**10.728.478**

Sumber : Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan

Dari tabel 4.11 tersebut, untuk mempermudah dalam memahami pertumbuhan jumlah wajib pajak pertahun selama tahun 2002 sampai 2009, maka penulis menggambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut:



Gambar 4.8
Grafik Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Di Indonesia

Dari gambar grafik 4.8 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak mengalami pertumbuhan yang signifikan tiap tahunnya terutama pada jenis wajib pajak orang pribadi. Berikut ini penjelasan lebih lanjut mengenai jumlah wajib pajak tahun 2002-2009 :

- Tahun 2002

  Pada tahun ini jumlah wajib pajak mencapai 2.591.256 wajib pajak. Jumlah tersebut berasal dari jumlah wajib pajak orang pribadi sebanyak 1.670.383, jumlah wajib pajak badan sebanyak 778.915, dan jumlah wajib pajak bendaharawan sebanyak 141.958.

- Tahun 2003

  Pada tahun ini jumlah wajib pajak mencapai 3.031.965 wajib pajak, meningkat sebesar 17% . Jumlah tersebut berasal dari jumlah wajib pajak orang pribadi sebanyak 2.007.861, jumlah wajib pajak badan sebanyak

860.504, dan jumlah wajib pajak bendaharawan sebanyak 163.600. Peningkatan jumlah wajib pajak ini terutama didorong oleh adanya program intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak dari wajib pajak yang telah terdaftar sebagai wajib pajak, sedangkan ekstensifikasi dimaksudkan untuk menambah jumlah wajib pajak terdaftar.

- Tahun 2004

  Pada tahun ini jumlah wajib pajak mencapai 3.445.091 wajib pajak, meningkat sebesar 13,6% . Jumlah tersebut berasal dari jumlah wajib pajak orang pribadi sebanyak 2.311.525, jumlah wajib pajak badan sebanyak 945.791, dan jumlah wajib pajak bendaharawan sebanyak 187.775. Peningkatan jumlah wajib pajak ini masih didorong oleh adanya program intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak dari wajib pajak yang telah terdaftar sebagai wajib pajak, sedangkan ekstensifikasi dimaksudkan untuk menambah jumlah wajib pajak terdaftar.

- Tahun 2005

  Pada tahun ini jumlah wajib pajak mencapai 3.863.385 wajib pajak, meningkat sebesar 12,1% . Jumlah tersebut berasal dari jumlah wajib pajak orang pribadi sebanyak 2.629.833, jumlah wajib pajak badan sebanyak 1.032.557, dan jumlah wajib pajak bendaharawan sebanyak 200.995. Peningkatan jumlah wajib pajak ini masih didorong oleh adanya program intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan

mengoptimalkan penerimaan pajak dari wajib pajak yang telah terdaftar sebagai wajib pajak, sedangkan ekstensifikasi dimaksudkan untuk menambah jumlah wajib pajak terdaftar.

- Tahun 2006

  Pada tahun ini jumlah wajib pajak mencapai 4.321.808 wajib pajak, meningkat sebesar 11,9% . Jumlah tersebut berasal dari jumlah wajib pajak orang pribadi sebanyak 2.937.738, jumlah wajib pajak badan sebanyak 1.114.688, dan jumlah wajib pajak bendaharawan sebanyak 269.382. Peningkatan jumlah wajib pajak ini masih didorong oleh adanya program intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak dari wajib pajak yang telah terdaftar sebagai wajib pajak, sedangkan ekstensifikasi dimaksudkan untuk menambah jumlah wajib pajak terdaftar.

- Tahun 2007

  Pada tahun ini jumlah wajib pajak mencapai 4.767.241 wajib pajak, meningkat sebesar 10,3% . Jumlah tersebut berasal dari jumlah wajib pajak orang pribadi sebanyak 3.229.705, jumlah wajib pajak badan sebanyak 1.215.906, dan jumlah wajib pajak bendaharawan sebanyak 321.630. Peningkatan jumlah wajib pajak ini masih didorong oleh adanya program intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak dari wajib pajak yang telah terdaftar sebagai wajib pajak, sedangkan ekstensifikasi dimaksudkan untuk menambah jumlah wajib pajak terdaftar.

- Tahun 2008

  Pada tahun ini jumlah wajib pajak mencapai 7.005.265 wajib pajak, meningkat sebesar 46,9% . Jumlah tersebut berasal dari jumlah wajib pajak orang pribadi sebanyak 5.316.685, jumlah wajib pajak badan sebanyak 1.333.806, dan jumlah wajib pajak bendaharawan sebanyak 354.774. Peningkatan jumlah wajib pajak pada tahun ini sangat signifikan, hal ini selain didorong oleh adanya program intensifikasi dan ekstensifikasi juga didorong oleh adanya *sunset policy* yaitu suatu kebijakan dimana wajib pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada tahun 2008 diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang bayar.

- Tahun 2009

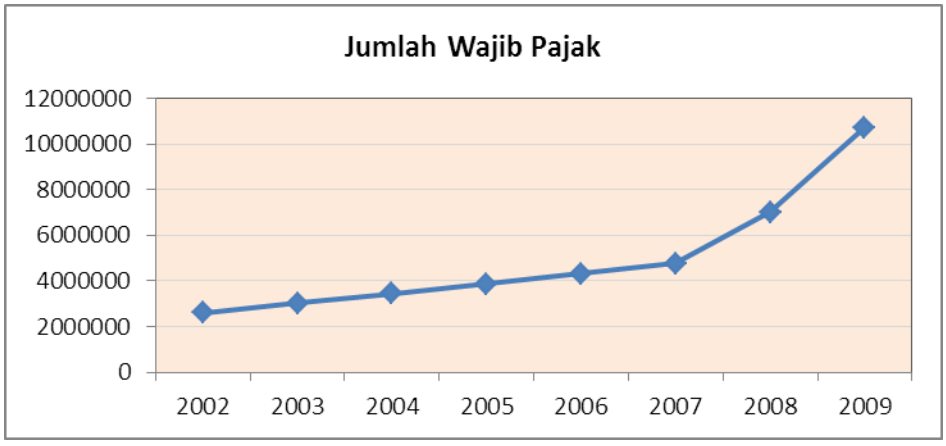
  Pada tahun ini jumlah wajib pajak mencapai 10.728.478 wajib pajak, meningkat sebesar 523,1 % . Jumlah tersebut berasal dari jumlah wajib pajak orang pribadi sebanyak 8.872.009, jumlah wajib pajak badan sebanyak 1.470.116, dan jumlah wajib pajak bendaharawan sebanyak 386.353. Peningkatan jumlah wajib pajak pada tahun ini juga sangat signifikan, hal ini selain didorong oleh adanya program intensifikasi dan ekstensifikasi juga didorong oleh adanya perpanjangan pelaksanaan *sunset policy* yang seharusnya berakhir pada 31 Desember 2008 menjadi 28 Febuari 2009.

Dari penjelasan diatas, diperoleh gambaran jumlah wajib pajak di Indonesia pada tahun 2002-2009 sebagai berikut.

Tabel 4.12
Perkembangan Jumlah Wajib Pajak di Indonesia

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Perkembangan	Pertumbuhan
2002	2.591.256	-	-
2003	3.031.965	440.709	17.01%
2004	3.445.091	413.126	13.63%
2005	3.863.385	418.294	12.14%
2006	4.321.808	458.423	11.87%
2007	4.767.241	445.433	10.31%
2008	7.005.265	2.238.024	46.95%
2009	10.728.478	3.723.213	53.15%
	Rata-Rata	**1.162.460**	**23.58%**

Pada tabel 4.12 dapat dilihat jumlah Wajib Pajak di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun 2002 hingga tahun 2009, namun bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia, jumlah Wajib Pajak di Indonesia pada tahun 2009 hanya sekitar 5% dari total penduduk Indonesia. Bila dilihat dari perkembangannya, jumlah Wajib Pajak di Indonesia rata-rata mengalami peningkatan sebanyak 1.162.460 WP setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 23,58% setiap tahunnya. Secara visual perkembangan jumlah Wajib Pajak di Indonesia dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 4.9
Grafik Perkembangan Jumlah Wajib Pajak di Indonesia

Pada grafik terlihat dengan jelas pada tahun 2008 dan tahun 2009 jumlah Wajib Pajak di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup besar. Pada tahun 2008 jumlah Wajib Pajak di Indonesia mengalami kenaikan sebanyak 2.238.024 WP dengan pertumbuhan sebesar 46,95%, kemudian pada tahun 2009 jumlah Wajib Pajak di Indonesia mengalami kenaikan sebanyak 3.723.213 WP dengan pertumbuhan sebesar 53,15%. Artinya dalam kurun waktu 2 tahun jumlah Wajib Pajak di Indonesia mengalami kenaikan sebanyak 5.961.237 Wajib Pajak. Hal ini selain dilaksanakannya kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, pemerintah juga melaksanakan program *sunset policy* dimana wajib pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada tahun 2008 diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang bayar.

Dari jumlah wajib pajak tersebut, berikut ini peranan masing-masing jenis wajib pajak terhadap penerimaan PPh tahun 2003-2009 :

Tabel 4.13
Kontribusi Jenis Wajib Pajak Terhadap Penerimaan PPh

Keterangan	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
WP Badan	59.967,78	94.943,86	116.446,23	136.261,18	166.223,18	212.630,23	227.369,19
WP Orang Pribadi	805,62	1.417,59	1.820,12	2.257,82	2.398,67	4.768,03	5.687,43
WP Bendaharawan	2.811,29	4.675,05	5.449,11	6.147,71	11.092,74	11.663,36	10.535,53
Total PPh	**63.584,83**	**101.090,49**	**123.715,46**	**144.666,71**	**179.714,61**	**229.061,62**	**243.592,16**
Kontribusi WP Badan	94%	94%	94%	94%	92%	93%	93%
Kontribusi WP Orang Pribadi	1%	1%	1%	2%	1%	2%	2%
Kontribusi WP Bendaharawan	4%	5%	4%	4%	6%	5%	4%

Sumber : MPN dan MP3 per 31 Maret 2010
Data penerimaan belum termasuk penerimaan pajak offline dan restitusi pajak

Data penerimaan tahun 2002 tidak ditampilkan karena belum/belum semuanya masuk ke MPN ataupun MP3

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Wajib Pajak Badan memiliki kontribusi sebesar 92% - 94%, Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 1% - 2%, sedangkan Wajib Pajak Bendaharawan sebesar 4% - 6% terhadap penerimaan PPh.

4.2.1.3 Analisis Jumlah Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia

Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi pemerintah dalam perpajakan membentuk suatu unit kerja yang dinamakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Secara bertahap sejak tahun 2002, Kantor Pelayanan Pajak telah mengalami modernisasi sistem dan struktur organisasi menjadi instansi yang berorientasi pada fungsi, bukan lagi pada jenis pajak. Kantor Pelayanan Pajak modern juga merupakan penggabungan dari Kantor Pelayanan Pajak konvensional dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak. Dalam implementasinya, terdapat 3 jenis KPP modern, yaitu :

1. KPP Wajib Pajak Besar (*Large Taxpayers Office*, LTO)
2. KPP Madya (*Medium Taxpayers Office*, MTO)
3. KPP Pratama (*Small Taxpayers Office*, STO)

Dalam penelitian ini, penulis mengungkapkan semua jenis Kantor Pelayanan Pajak. Adapun informasi mengenai jumlah Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia selama tahun 2002 sampai 2009 dapat dilihat dari tabel 4.14 sebagai berikut :

Tabel 4.14
Jumlah Kantor Pelayanan Pajak Di Indonesia

Tahun	Jumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
2002	166 Kantor
2003	176 Kantor
2004	181 Kantor
2005	186 Kantor
2006	191 Kantor
2007	266 Kantor
2008	331 Kantor
2009	332 Kantor

Sumber : Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan, 2010

Dari tabel 4.14 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah Kantor Pelayanan Pajak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berikut ini penjelasan lebih lanjut mengenai jumlah Kantor Pelayanan Pajak tahun 2002-2009 :

- Tahun 2002

  Tahun ini merupakan tahun awal dimulainya modernisasi sistem dan struktur organisasi pada KPP, dimana KPP menjadi instansi yang berorientasi pada fungsi, bukan lagi pada jenis pajak. Pada tahun ini jumlah KPP di seluruh Indonesia mencapai 166 kantor. 2 kantor diantaranya merupakan KPP WP Besar atau LTO (*Large Tax Office*). KPP ini menangani 300 WP Badan terbesar di seluruh Indonesia dan hanya mengadministrasikan jenis pajak PPH dan PPN.

- Tahun 2003

  Pada tahun ini jumlah KPP mencapai sebanyak 176 kantor, meningkat sebanyak 10 kantor atau 6,1% dari tahun sebelumnya. Dari 10 kantor tersebut, 9 kantor merupakan KPP Pratama yang tersebar di Riau dan Kepulauan Riau, Banten, Jawa Tengah II, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara, serta 1 kantor Khusus yaitu KPP BUMN.

- Tahun 2004

  Pada tahun ini jumlah KPP mencapai 181 kantor, meningkat sebanyak 5 kantor atau 2,9% dari tahun sebelumnya. Selain membentuk 2 KPP Pratama di Jawa Barat II dan Papua, pada tahun ini DJP juga membentuk 1 KPP Madya yang berada di Jakarta Pusat, serta 1 KPP Penanaman Modal Asing, dan 1 KPP Badan dan Orang Asing yang berada di Jakarta Khusus.

- Tahun 2005

  Pada tahun ini jumlah KPP mencapai 186 kantor, meningkat sebanyak 5 kantor atau 2,9% dari tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah KPP tersebut karena adanya pembentukan 4 KPP Pratama di Jakarta Pusat dan 1 KPP Pratama di Nusa Tenggara.

- Tahun 2006

  Pada tahun ini jumlah KPP mencapai 191 kantor, meningkat sebanyak 5 kantor atau 2,7% dari tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah KPP tahun ini disebabkan karena adanya pembentukan beberapa KPP Madya diberbagai wilayah, yaitu 2 KPP Madya di Riau dan Kepulauan Riau, 1 KPP Madya di Banten, 1 KPP Madya di Jawa Barat II, serta 1 KPP Madya di Bali.

- Tahun 2007

  Pada tahun ini jumlah KPP mencapai 266 kantor, meningkat sebanyak 75 kantor atau 39,3% dari tahun sebelumnya. Peningkatan yang signifikan ini disebabkan adanya pembentukan KPP Madya maupun KPP Pratama secara besar-besaran. Pada tahun ini DJP membentuk 13 KPP Madya dan 62 KPP Pratama yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Pembentukan KPP Madya ini dimaksudkan sebagai kantor wilayah pajak di setiap wilayah Indonesia, sedangkan KPP Pratama sebagai ujung tombak bagi DJP untuk menambah rasio perpajakan, karena KPP ini merupakan KPP yang berfungsi menangani pelayanan untuk wajib pajak menengah kebawah, wajib pajak badan dan orang pribadi serta bendaharawan pemerintah. Perbedaan jenis KPP ini dengan KPP lainnya adalah adanya seksi ekstensifikasi.

- Tahun 2008

  Pada tahun ini jumlah KPP mencapai 331 kantor, meningkat sebanyak 65 kantor atau 24,4% dari tahun sebelumnya. Peningkatan yang signifikan ini masih disebabkan dari adanya pembentukan KPP Pratama yang tersebar diseluruh Indonesia.

- Tahun 2009

  Pada tahun ini jumlah KPP mencapai 332 kantor, meningkat sebanyak 1 kantor yaitu kantor Wajib Pajak Besar Orang Pribadi. KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi adalah Kantor Pelayanan Pajak yang mengadministrasikan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di wilayah DKI Jakarta yang memenuhi kriteria tertentu. Hal ini merupakan kelanjutan dari proses

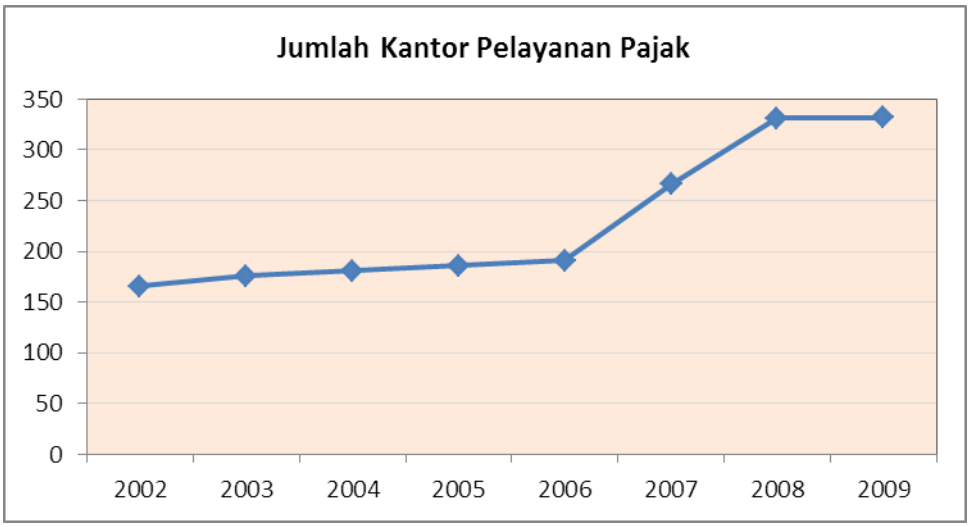
modernisasi dan wujud apresiasi Pemerintah terhadap para Wajib Pajak Orang Pribadi. Pembentukkan Kantor Pelayanan Pajak ini dimaksudkan agar Wajib Pajak ini mendapatkan pelayanan yang lebih khusus dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya serta mendapatkan informasi yang lebih cepat dan lengkap tentang peraturan perpajakan. KPP ini mulai aktif sejak tanggal 1 Mei 2009.

Dari penjelasan diatas, diperoleh gambaran perkembangan Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia pada tahun 2002-2009 sebagai berikut.

Tabel 4.15
Perkembangan Jumlah Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia

Tahun	Jumlah Kantor Pelayanan Pajak	Perkembangan	Pertumbuhan
2002	166	-	-
2003	176	10	6.02%
2004	181	5	2.84%
2005	186	5	2.76%
2006	191	5	2.69%
2007	266	75	39.27%
2008	331	65	24.44%
2009	332	1	0.30%
	Rata-Rata	**24**	**11.19%**

Dilihat dari perkembangannya jumlah Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini sejalan dengan modernisasi sistem dan struktur organisasi dilakukan oleh DJP sejak tahun 2002. Jumlah Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia rata-rata mengalami peningkatan sebesar 24 buah setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,19% setiap tahunnya. Secara visual perkembangan jumlah Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 4.10
Grafik Perkembangan Jumlah Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia

Pada grafik terlihat dengan jelas pada tahun 2007 dan tahun 2008 jumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup besar. Pada tahun 2007 jumlah Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia mengalami kenaikan sebanyak 75 KPP dengan pertumbuhan sebesar 39,27%, kemudian pada tahun 2008 jumlah KPP di Indonesia mengalami kenaikan sebanyak 65 KPP dengan pertumbuhan sebesar 24,44%.

Dengan pertumbuhan KPP tersebut diatas, maka berikut ini merupakan gambaran rasio jumlah KPP terhadap jumlah penduduk di Indonesia :

Tabel 4.16
Rasio KPP Terhadap Jumlah Penduduk Indonesia

Keterangan	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Jumlah KPP	166	176	181	186	191	266	331	332
Jumlah Penduduk Indonesia	212.000.000*	215.000.000*	217.000.000*	218.000.000*	221.000.000*	232.000.000*	236.000.000*	238.000.000*
Rasio KPP terhadap jumlah penduduk	1.277.108	1.221.591	1.198.895	1.172.043	1.157.068	872.180	712.991	716.867

Sumber : Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan & Berita Statistik
*angka merupakan pembulatan

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa pelayanan Kantor Pelayanan Pajak dilihat dari jumlah kantornya, mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2002, 1 KPP digunakan untuk melayani sekitar 1.277.108 penduduk Indonesia, kini pada tahun 2009 1 KPP dioperasikan untuk melayani sekitar 716.867 penduduk Indonesia. Jika 1 KPP memiliki sekitar 95 pegawai pajak, maka 1 pegawai pajak pada tahun 2009 harus melayani sekitar 7.500 penduduk Indonesia.

4.2.1.4 Analisis Penerimaan Pajak di Indonesia

Pelaksanaan pemerintah dapat dilaksanakan dengan adanya unsur pendukung yang salah satunya adalah tersedianya dana, guna pembiayaan fungsi pemerintah secara optimal. Sumber penerimaan negara Indonesia yang paling potensial adalah penerimaan pajak. Penerimaan pajak akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia setiap tahunnya menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dimana didalamnya menggambarkan tentang jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran Negara selama satu tahun.

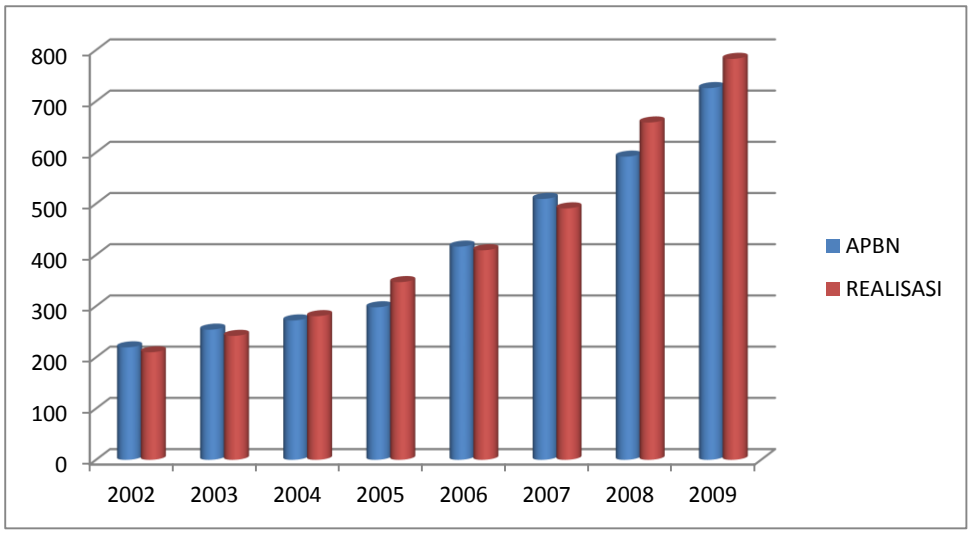
Dalam penelitian ini, penulis akan mengungkapkan penerimaan pajak dalam APBN dan realisasinya. Adapun informasi mengenai penerimaan pajak di Indonesia selama tahun 2002 sampai 2009 dapat dilihat dari tabel 4.17 sebagai berikut :

Tabel 4.17
Penerimaan Pajak Indonesia Selama Tahun 2002-2009
(Triliun rupiah)

Tahun Pajak	APBN	Realisasi
2002	219,63	210.09
2003	254,14	242.05
2004	272,18	280.56
2005	297,84	347.03
2006	416,31	409.20
2007	509,46	490.99
2008	591,98	658.70
2009	725,84	782.94

Sumber : Badan Kebijakan Fiskal dan Pusintek Departemen Keuangan RI, 2007-2010

Dari tabel 4.17 tersebut, untuk mempermudah dalam memahami pertumbuhan penerimaan pajak selama tahun 2002 sampai 2009, maka penulis menggambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut:



Gambar 4.11
Grafik Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia

Dari gambar grafik 4.11 di atas, dapat dilihat bahwa penerimaan pajak di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berikut ini penjelasan lebih lanjut mengenai penerimaan pajak tahun 2002-2009 :

- Tahun 2002

  Pada tahun ini, pemerintah merancang APBN dengan anggaran penerimaan pajak sebesar Rp.219,63 triliun, sedangkan pada realisasinya penerimaan pajak sebesar Rp. 210,09 triliun atau mencapai 95,7% dari target yang telah ditentukan.

- Tahun 2003

  Pada tahun ini, pemerintah merancang APBN dengan anggaran penerimaan pajak sebesar Rp. 254,14 triliun, sedangkan pada realisasinya penerimaan pajak sebesar Rp. 242,05 triliun atau mencapai 95,2% dari target yang telah ditentukan.

- Tahun 2004

  Pada tahun ini, pemerintah merancang APBN dengan anggaran penerimaan pajak sebesar Rp. 272,18 triliun, sedangkan pada realisasinya penerimaan pajak sebesar Rp. 280,56 triliun atau mencapai 103,1% dari target yang telah ditentukan.

- Tahun 2005

  Pada tahun ini, pemerintah merancang APBN dengan anggaran penerimaan pajak sebesar Rp. 297,84 triliun, sedangkan pada realisasinya penerimaan pajak sebesar Rp. 347,03 triliun atau mencapai 116,5% dari target yang telah ditentukan.

- Tahun 2006

  Pada tahun ini, pemerintah merancang APBN dengan anggaran penerimaan pajak sebesar Rp. 416,31 triliun, sedangkan pada realisasinya penerimaan pajak sebesar Rp. 409,2 triliun atau mencapai 98,3% dari target yang telah ditentukan.

- Tahun 2007

  Pada tahun ini, pemerintah merancang APBN dengan anggaran penerimaan pajak sebesar Rp. 509,46 triliun, sedangkan pada realisasinya penerimaan pajak sebesar Rp. 490,99 triliun atau mencapai 96,4% dari target yang telah ditentukan.

- Tahun 2008

  Pada tahun ini, pemerintah merancang APBN dengan anggaran penerimaan pajak sebesar Rp. 591,98 triliun, sedangkan pada realisasinya penerimaan pajak sebesar Rp. 658,7 triliun atau mencapai 111,3% dari target yang telah ditentukan.

- Tahun 2009

  Pada tahun ini, pemerintah merancang APBN dengan anggaran penerimaan pajak sebesar Rp. 725,84 triliun, sedangkan pada realisasinya penerimaan pajak sebesar Rp. 782,94 triliun atau mencapai 111,3% dari target yang telah ditentukan.

Dari penjelasan diatas, diperoleh gambaran penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2002-2009 sebagai berikut.

Tabel 4.18
Perkembangan Penerimaan Pajak di Indonesia

Tahun	Penerimaan Pajak	Perkembangan	Pertumbuhan
2002	210.09	-	-
2003	242.05	31.96	15.21%
2004	280.56	38.51	15.91%
2005	347.03	66.47	23.69%
2006	409.20	62.17	17.91%
2007	490.99	81.79	19.99%
2008	658.70	167.71	34.16%
2009	782.94	124.24	18.86%
	Rata-rata	**81.84**	**20.82%**

Pada tabel 4.18 dapat dilihat penerimaan pajak di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun 2002 hingga tahun 2009. Bila dilihat dari perkembangannya, penerimaan pajak di Indonesia secara rata-rata mengalami peningkatan sebesar 81,84 triliun rupiah setiap tahunnya dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 20,82% setiap tahun. Secara visual perkembangan penerimaan pajak pada Indonesia dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 4.12
Grafik Perkembangan Penerimaan pajak Indonesia

Pada grafik terlihat penerimaan pajak di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan penerimaan pajak paling tinggi terjadi pada tahun 2008, yaitu mengalami peningkatan sebesar 34,16% dengan nominal sekitar 167,71 triliun rupiah. Jika dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto yang dihasilkan maka penerimaan pajak ini belum optimal. Hal ini tercermin dari rasio pajak pada tabel berikut ini :

Tabel 4.19
Rasio Perpajakan Indonesia

Tahun	Produk Domestik Bruto	Penerimaan Pajak	Rasio Pajak
2002	1.421,68	210,09	14,8%
2003	1.594,90	242,05	15,2%
2004	2.083,08	280,56	13,5%
2005	2.458,23	347,03	14,1%
2006	3.967,04	409,20	10,3%
2007	4.234,41	490,99	11,6%
2008	4.427,19	658,7	14,9%
2009	5.146,51	782,94	15,2%
Rata-rata Rasio Pajak			**13,7%**

Tax Ratio atau rasio Penerimaan Pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan pendapatan nasional. Rasio dimaksud pada dasarnya menunjukkan jumlah penerimaan pajak yang dapat dipungut dari setiap rupiah pendapatan nasional (Produk Domestik Bruto). Rasio ini biasa digunakan sebagai salah satu tolak ukur atau indikator untuk melakukan penilaian terhadap kinerja penerimaan perpajakan mengingat PDB yang menunjukkan output nasional merupakan indikator kesejahteraan masyarakat. Kenaikan rasio ini bisa mengindikasikan keberhasilan dalam proses pemungutan pajak, karena menunjukkan semakin tingginya nilai

rupiah yang dapat dipungut sebagai penerimaan pajak dari setiap rupiah output nasional.

Sebagai perbandingan *tax ratio* rata-rata di beberapa negara Asia menunjukkan urutan sebagai berikut :

Tabel 4.20
***Tax Ratio* Beberapa Negara Asia**

No. Urut	Negara	Tax Ratio
1.	Korea Selatan	26,8 %
2.	Singapura	21,4 %
3.	Thailand	17,0 %
4.	Srilanka	17,0 %
5.	China	17,0 %
6.	Malaysia	15,5 %
7.	Filipina	14,4 %
8.	Vietnam	13,8 %
9.	Indonesia	13,7 %
10.	India	10,9 %
11.	Laos	10,8 %

Sumber : Harian Bisnis Indonesia, Juni 2010 & Okezone, Juli 2011

4.2.2 Hasil Analisis Kuantitatif

4.2.2.1 Analisis Pengaruh Produk Domestik Bruto, Jumlah Wajib Pajak dan Jumlah Kantor Pelayanan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak.

Setelah diuraikan gambaran data variabel penelitian, selanjutnya untuk menguji pengaruh Produk Domestik Bruto, jumlah Wajib Pajak dan jumlah Kantor Pelayanan Pajak terhadap penerimaan pajak, baik secara simultan maupun parsial, digunakan analisis regresi berganda. Pengujian akan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut; Pengujian uji asumsi klasik, analisis regresi, analisis korelasi parsial, koefisien determinasi serta pengujian hipotesis. Semua tahapan

tersebut dilakukan dengan bantuan software SPSS.17. dan untuk lebih jelasnya akan dibahas berikut ini.

4.2.2.2 Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis menggunakan analisis regressi linier berganda, ada beberapa asumsi yang harus terpenuhi agar kesimpulan dari regressi tersebut tidak bias, diantaranya adalah uji normalitas, uji multikolinieritas (untuk regressi linear berganda), uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi (untuk data yang berbentuk deret waktu). Pada penelitian ini keempat asumsi yang disebutkan diatas tersebut diuji karena variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini lebih dari satu (berganda) dan data yang dikumpulkan mengandung unsur deret waktu (8 tahun pengamatan).

1) Uji Asumsi Normalitas

Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian kebermaknaan (signifikansi) koefisien regressi, apabila model regressi tidak berdistribusi normal maka kesimpulan dari uji F dan uji t masih meragukan, karena statistik uji F dan uji t pada analisis regressi diturunkan dari distribusi normal. Pada penelitian ini digunakan uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas model regressi.

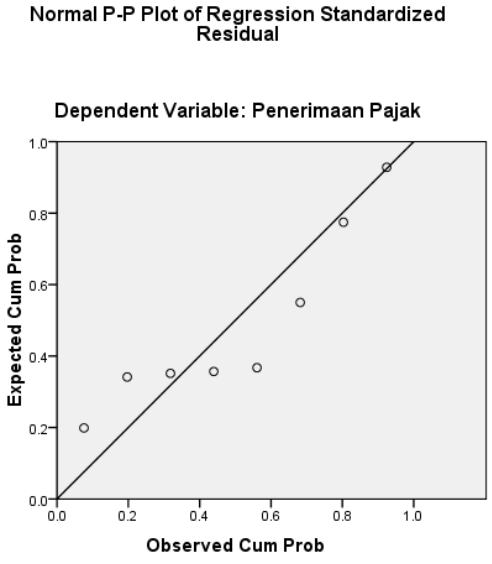
Tabel 4.21
Hasil Pengujian Asumsi Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		8
Normal Parameters[a,,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	13.36839688
Most Extreme Differences	Absolute	.298
	Positive	.298
	Negative	-.169
Kolmogorov-Smirnov Z		.843
Asymp. Sig. (2-tailed)		.476

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Pada tabel 4.21 dapat dilihat nilai probabilitas (sig.) yang diperoleh dari uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,476. Karena nilai probabilitas pada uji Kolmogorov-Smirnov masih lebih besar dari tingkat kekeliruan 5% (0.05), maka disimpulkan bahwa model regressi berdistribusi normal. Secara visual gambar grafik normal probability plot dapat dilihat pada gambar 4.13 berikut:



Gambar 4.13
Grafik Normalitas

Grafik diatas mempertegas bahwa model regressi yang diperoleh berdisitribusi normal, dimana sebaran data berada disekitar garis diagonal.

2) Uji Asumsi Multikolinieritas

Multikolinieritas berarti adanya hubungan yang kuat di antara beberapa atau semua variabel bebas pada model regresi. Jika terdapat Multikolinieritas maka koefisien regresi menjadi tidak tentu, tingkat kesalahannya menjadi sangat besar dan biasanya ditandai dengan nilai koefisien determinasi yang sangat besar tetapi pada pengujian parsial koefisien regresi, tidak ada ataupun kalau ada sangat sedikit sekali koefisien regresi yang signifikan. Pada penelitian ini digunakan nilai variance inflation factors (VIF) sebagai indikator ada tidaknya multikolinieritas diantara variabel bebas.

Tabel 4.22
Hasil Pengujian Asumsi Multikolinieritas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PDB	.223	4.494
	WP	.179	5.591
	KPP	.151	6.638

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Melalui nilai VIF yang diperoleh seperti pada tabel 4.22 diatas menunjukkan tidak ada korelasi yang cukup kuat antara sesama variabel bebas, dimana nilai VIF dari ketiga variabel bebas masih lebih kecil dari 10 dan dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas diantara ketiga variabel bebas.

3) Uji Asumsi Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan indikasi varian antar residual tidak homogen yang mengakibatkan nilai taksiran yang diperoleh tidak efisien. Untuk menguji homogenitas varian dari residual digunakan uji rank Spearman, yaitu dengan mengkorelasikan variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual(error). Apabila koefisien korelasi dari masing-masing variabel independen ada yang signifikan pada tingkat kekeliruan 5%, mengindikasikan adanya heteroskedastisitas. Pada tabel 4.23 berikut dapat dilihat nilai signifikansi masing-masing koefisien korelasi variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual(error).

Tabel 4.23
Hasil Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas

Correlations

			absolut_error
Spearman's rho	absolut_error	Correlation Coefficient	1.000
		Sig. (2-tailed)	.
		N	8
	PDB	Correlation Coefficient	.214
		Sig. (2-tailed)	.610
		N	8
	WP	Correlation Coefficient	.214
		Sig. (2-tailed)	.610
		N	8
	KPP	Correlation Coefficient	.214
		Sig. (2-tailed)	.610
		N	8

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan hasil korelasi yang diperoleh seperti dapat dilihat pada tabel 4.23 diatas memberikan suatu indikasi bahwa residual (error) yang muncul dari persamaan regresi mempunyai varians yang sama (tidak terjadi

heteroskedastisitas), dimana nilai signifikansi (sig) dari masing-masing koefisien korelasi kedua variabel bebas dengan nilai absolut error (yaitu 0,610) masih lebih besar dari 0,05.

4) Uji Asumsi Autokorelasi

Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi antar observasi yang diukur berdasarkan deret waktu dalam model regresi atau dengan kata lain error dari observasi tahun berjalan dipengaruhi oleh error dari observasi tahun sebelumnya. Pada pengujian autokorelasi digunakan uji Durbin-Watson untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi pada model regressi dan berikut nilai Durbin-Watson yang diperoleh melalui hasil estimasi model regressi.

Tabel 4.24
Nilai Durbin-Watson Untuk Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.998[a]	.996	.993	17.68473	2.483

a. Predictors: (Constant), KPP, PDB, WP

b. Dependent Variable: Penerimaan

Berdasarkan hasil pengolahan diperoleh nilai statistik Durbin-Watson (D-W) = 2,483, sementara dari tabel d untuk jumlah variabel bebas = 3 dan jumlah pengamatan n = 8 diperoleh batas bawah nilai tabel (d_L) = 0,368 dan batas atasnya (d_U) = 2,287. Karena nilai Durbin-Watson model regressi (2,483) berada diantara d_U (2,287) dan 4-d_L (3,632), yaitu daerah tidak ada keputusan maka belum dapat disimpulkan apakah terjadi autokorelasi pada model regressi.

Gambar 4.14
Daerah Kriteria Pengujian Autokorelasi



Untuk memastikan ada tidaknya autokorelasi maka pengujian dilanjutkan menggunakan *runs test* (Gujarati,2003;465). Hasil pengujian menggunakan runs test dapat dilihat pada tabel 4.25 berikut ini:

Tabel 4.25
Hasil Runs Test

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value [a]	2.78176
Cases < Test Value	4
Cases >= Test Value	4
Total Cases	8
Number of Runs	7
Z	1.146
Asymp. Sig. (2-tailed)	.252

a. Median

Melalui hasil runs test pada tabel 4.25 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi uji Z (yaitu 0,252) masih lebih besar dari 0,05 yang mengindikasikan tidak terdapat autokkorelasi pada model regressi. Setelah keempat asumsi regressi diuji dan terpenuhi, selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis, yaitu pengaruh Produk Domestik Bruto, jumlah Wajib Pajak dan jumlah Kantor Pelayanan Pajak terhadap penerimaan pajak.

4.2.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu Produk Domestik Bruto, jumlah Wajib Pajak dan jumlah Kantor Pelayanan Pajak terhadap penerimaan pajak. Estimasi model regresi linier berganda ini menggunakan software SPSS.17 dan diperoleh hasil output sebagai berikut :

Tabel 4.26
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-86.697	28.009		-3.095	.036
	Produk Domestik Bruto	.045	.010	.313	4.520	.011
	Wajib Pajak	2.989E-5	.000	.393	5.091	.007
	Kantor Pelayanan Pajak	.983	.244	.338	4.024	.016

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Dari tabel diatas dibentuk persamaan regresi linier sebagai berikut :

$$\mathbf{Y = -86{,}697 + 0{,}045\ X_1 + (2{,}989E\text{-}5)\ X_2 + 0{,}983\ X_3}$$

Dimana :

Y = Penerimaan pajak

X_1 = Produk Domestik Bruto

X_2 = Jumlah Wajib Pajak

X_3 = Jumlah Kantor Pelayanan Pajak

Koefisien yang terdapat pada persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar -86,697 triliun rupiah menunjukkan nilai rata-rata penerimaan pajak di Indonesia selama periode tahun 2002-2009 jika Produk

Domestik Bruto, jumlah Wajib Pajak dan jumlah Kantor Pelayanan Pajak sama dengan nol.

2. Produk Domestik Bruto memiliki koefisien bertanda positif sebesar 0,045, artinya setiap peningkatan Produk Domestik Bruto sebesar 1 triliun rupiah diprediksi akan meningkatkan penerimaan pajak sebesar 0,045 triliun rupiah, dengan asumsi jumlah Wajib Pajak dan jumlah Kantor Pelayanan Pajak tidak berubah.
3. Jumlah Wajib Pajak memiliki koefisien bertanda positif sebesar 0,00002989, artinya setiap penambahan jumlah Wajib Pajak sebanyak 1 juta orang diprediksi akan meningkatkan penerimaan pajak sebesar 29,89 triliun rupiah, dengan asumsi Produk Domestik Bruto dan jumlah Kantor Pelayanan Pajak tidak berubah.
4. Jumlah Kantor Pelayanan Pajak memiliki koefisien bertanda positif sebesar 0,983, artinya setiap penambahan jumlah Kantor Pelayanan Pajak sebanyak 1 diprediksi akan meningkatkan penerimaan pajak sebesar 983 milliar rupiah dengan asumsi jumlah Wajib Pajak dan Produk Domestik Bruto tidak berubah.

4.2.2.4 Analisis Korelasi Parsial

Korelasi parsial digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan masing-masing variabel independen (Produk Domestik Bruto, jumlah Wajib Pajak dan jumlah Kantor Pelayanan Pajak) dengan penerimaan pajak. Melalui korelasi

parsial akan dicari pengaruh masing-masing variabel independen terhadap penerimaan pajak ketika variabel independen lainnya dianggap konstan.

a. Korelasi Produk Domestik Bruto Dengan Penerimaan pajak Ketika Jumlah Wajib Pajak dan Jumlah Kantor Pelayanan Pajak Tidak Berubah

Koefisien korelasi antara Produk Domestik Bruto dengan penerimaan pajak ketika jumlah Wajib Pajak dan jumlah Kantor Pelayanan Pajak tidak berubah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.27
Koefisien Korelasi Parsial Produk Domestik Bruto Dengan Penerimaan pajak

Correlations

Control Variables			Penerimaan	PDB
WP & KPP	Penerimaan	Correlation	1.000	.914
		Significance (2-tailed)	.	.011
		df	0	4
	PDB	Correlation	.914	1.000
		Significance (2-tailed)	.011	.
		df	4	0

Hubungan antara Produk Domestik Bruto dengan penerimaan pajak ketika jumlah Wajib Pajak dan jumlah Kantor Pelayanan Pajak tidak berubah adalah sebesar 0,914 dengan arah positif. Artinya hubungan Produk Domestik Bruto dengan penerimaan pajak termasuk sangat kuat/sangat erat ketika jumlah Wajib Pajak dan jumlah Kantor Pelayanan Pajak tidak mengalami perubahan. Tanda positif menggambarkan bahwa ketika Produk Domestik Bruto meningkat, sementara jumlah Wajib Pajak dan jumlah Kantor Pelayanan Pajak tidak berubah maka penerimaan pajak akan meningkat. Kemudian besar pengaruh Produk

Domestik Bruto terhadap penerimaan pajak ketika jumlah Wajib Pajak dan jumlah Kantor Pelayanan Pajak perusahaan tetap adalah $(0,914)^2 \times 100\% = 83,5\%$.

b. Korelasi Jumlah Wajib Pajak Dengan Penerimaan pajak Ketika Produk Domestik Bruto dan Jumlah Kantor Pelayanan Pajak Tidak Berubah

Koefisien korelasi antara jumlah Wajib Pajak dengan penerimaan pajak ketika Produk Domestik Bruto dan jumlah Kantor Pelayanan Pajak tidak berubah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.28
Koefisien Korelasi Parsial Jumlah Wajib Pajak Dengan Penerimaan pajak

Correlations

Control Variables			Penerimaan	WP
KPP & PDB	Penerimaan	Correlation	1.000	.931
		Significance (2-tailed)	.	.007
		df	0	4
	WP	Correlation	.931	1.000
		Significance (2-tailed)	.007	.
		df	4	0

Hubungan antara jumlah Wajib Pajak dengan penerimaan pajak ketika Produk Domestik Bruto dan jumlah Kantor Pelayanan Pajak tidak berubah adalah sebesar 0,931 dengan arah positif. Artinya hubungan jumlah Wajib Pajak dengan penerimaan pajak termasuk sangat kuat/sangat erat ketika Produk Domestik Bruto dan jumlah Kantor Pelayanan Pajak tidak mengalami perubahan. Tanda positif menggambarkan bahwa ketika jumlah Wajib Pajak meningkat, sementara Produk Domestik Bruto dan jumlah Kantor Pelayanan Pajak tidak berubah maka penerimaan pajak akan meningkat. Kemudian besar pengaruh jumlah Wajib Pajak

terhadap penerimaan pajak ketika Produk Domestik Bruto dan jumlah Kantor Pelayanan Pajak perusahaan tetap adalah $(0,931)^2 \times 100\% = 86,7\%$.

c. Korelasi Jumlah Kantor Pelayanan Pajak Dengan Penerimaan pajak Ketika Produk Domestik Bruto dan Jumlah Wajib Pajak Tidak Berubah

Koefisien korelasi antara jumlah Kantor Pelayanan Pajak dengan penerimaan pajak ketika Produk Domestik Bruto dan jumlah Wajib Pajak tidak berubah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.29
Koefisien Korelasi Parsial Jumlah Kantor Pelayanan Pajak Dengan Penerimaan pajak

Correlations

Control Variables			Penerimaan	KPP
PDB & WP	Penerimaan	Correlation	1.000	.895
		Significance (2-tailed)	.	.016
		df	0	4
	KPP	Correlation	.895	1.000
		Significance (2-tailed)	.016	.
		df	4	0

Hubungan antara jumlah Kantor Pelayanan Pajak dengan penerimaan pajak ketika Produk Domestik Bruto dan jumlah Wajib Pajak tidak berubah adalah sebesar 0,895 dengan arah positif. Artinya hubungan jumlah Kantor Pelayanan Pajak dengan penerimaan pajak kuat/erat ketika Produk Domestik Bruto dan jumlah Wajib Pajak tidak mengalami perubahan. Ini menggambarkan bahwa ketika jumlah Kantor Pelayanan Pajak meningkat, sementara Produk Domestik Bruto dan jumlah Wajib Pajak tidak berubah maka penerimaan pajak akan meningkat. Kemudian besar pengaruh jumlah Kantor Pelayanan Pajak

terhadap penerimaan pajak ketika Produk Domestik Bruto dan jumlah Wajib Pajak tetap adalah $(0,895)^2 \times 100\% = 80,1\%$.

4.2.2.5 Koefisien Korelasi Berganda

Korelasi ganda merupakan angka yang menunjukan kekuatan hubungan antar ketiga variabel bebas secara bersama-sama dengan variabel penerimaan pajak. Hubungan korelasi secara simultan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.30
Analisis Koefisien Korelasi Berganda dan Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.998[a]	.996	.993	17.68473	2.483

a. Predictors: (Constant), KPP, PDB, WP

b. Dependent Variable: Penerimaan

Berdasarkan data pada tabel 4.30 diatas dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi ganda adalah sebesar 0,998 (R) yang berada antara 0,80 - 1,00, artinya Produk Domestik Bruto, jumlah Wajib Pajak dan jumlah Kantor Pelayanan Pajak secara simultan memiliki hubungan yang sangat kuat dengan penerimaan pajak.

4.2.2.6 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar variabel Produk Domestik Bruto, jumlah Wajib Pajak dan jumlah Kantor Pelayanan Pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Untuk nilai koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.30 tepatnya dilihat dari nilai R

Square yaitu sebesar 0,996 atau 99,6%, artinya pengaruh Produk Domestik Bruto, jumlah Wajib Pajak dan jumlah Kantor Pelayanan Pajak secara simultan terhadap penerimaan pajak sebesar 99,6% sedangkan sisanya yaitu 0,4% merupakan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini yaitu jumlah penduduk (Asmy Asmuri).

4.2.2.7 Pengujian Hipotesis Secara Simultan

Selanjutnya untuk menguji apakah terdapat pengaruh Produk Domestik Bruto, jumlah Wajib Pajak dan jumlah Kantor Pelayanan Pajak terhadap penerimaan pajak maka perlu dilakukan pengujian hipotesis secara simultan yang dapat silihat dari tabel ANOVA hasil pengolahan SPSS.17. Langkah-langkah pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

a. Merumuskan hipotesis statistik

   $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$: Menunjukkan variabel Produk Domestik Bruto, jumlah Wajib Pajak dan jumlah Kantor Pelayanan Pajak tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel penerimaan pajak di Indonesia.

   $H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$: Menunjukan variabel Produk Domestik Bruto, jumlah Wajib Pajak dan jumlah Kantor Pelayanan Pajak berpengaruh secara simultan terhadap variabel penerimaan pajak di Indonesia.

b. Menentukan tingkat signifikansi

   Tingkat signifikansi tersebut adalah sebesar $\alpha = 0,05$ atau 5 % dengan derajat kebebasan (k; n-k-1) df= 3;4. Pada tabel F untuk df_1= 3, df_2=4, maka diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 6,591.

c. Mencari nilai F_{hitung}

Dengan bantuan software SPSS v.17, diperoleh output untuk mendapatkan nilai dari F_{hitung} sebagai berikut :

Tabel 4.31
Anova Untuk Uji Simultan (Uji F)

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	292631.196	3	97543.732	311.891	.000[a]
	Residual	1250.998	4	312.750		
	Total	293882.195	7			

a. Predictors: (Constant), KPP, PDB, WP

b. Dependent Variable: Penerimaan

Pada tabel diatas, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 311,891.

d. Menentukan kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} dengan ketentuan :

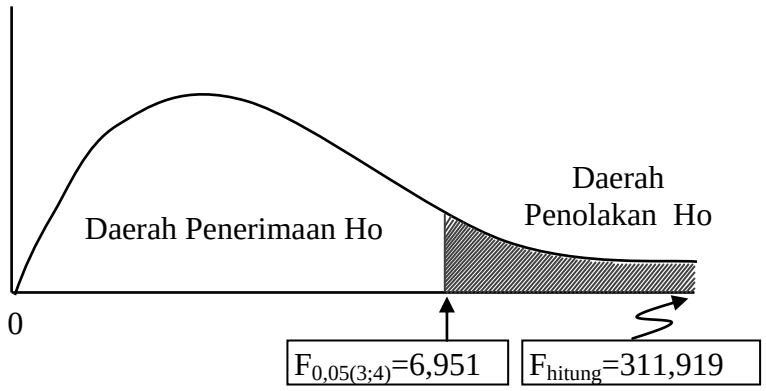
Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak (signifikan)

Jika $F_{hitung} < F_{tabel,}$ maka H_0 diterima (tidak signifikan)

Hasil yang diperoleh dari perbandingan F_{hitung} dengan F_{tabel} adalah $F_{hitung} > F_{tabel}$ (311,891 > 6,591), maka pada tingkat kekeliruan 5% Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti ketiga variabel bebas, yaitu Produk Domestik Bruto, jumlah Wajib Pajak dan jumlah Kantor Pelayanan Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Selain itu peneliti juga melakukan pengujian dengan cara melihat tingkat signifikansi yang dapat dilihat pada tabel 4.31.

Dari tabel ANOVA diatas diperoleh nilai signifikansi uji F sebesar 0,000, karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansi adalah Ho ditolak dan kesimpulannya adalah terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dari Produk Domestik Bruto, jumlah Wajib Pajak dan jumlah Kantor Pelayanan Pajak terhadap penerimaan pajak di Indonesia.

Berdasarkan uji hipotesis dapat digambarkan daerah penolakan dan penerimaan Ho sebagai berikut :



Gambar 4.15

Daerah Penolakan H_0 Pada Pengujian Secara Bersama-sama

e. Pengambilan keputusan hipotesis

Berdasarkan gambar 4.15 diatas dapat dilihat bahwa Ho ditolak, karena F_{hitung} sebesar 311,919 berada pada daerah penolakan Ho, yang menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto, jumlah Wajib Pajak dan jumlah Kantor Pelayanan Pajak secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Indonesia.

4.2.2.8 Pengaruh Produk Domestik Bruto, Jumlah Wajib Pajak dan Jumlah Kantor Pelayanan Pajak Terhadap Penerimaan pajak Secara Parsial.

Pengujian secara parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Statistik uji yang digunakan pada pengujian parsial adalah uji t. Nilai tabel yang digunakan sebagai nilai kritis pada uji parsial (uji t) sebesar 2,776 yang diperoleh dari tabel t pada α = 0.05 dan derajat bebas 4 untuk pengujian dua pihak. Nilai statistik uji t yang digunakan pada pengujian secara parsial dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.32

Uji Parsial (Uji t)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-86.697	28.009		-3.095	.036
	PDB	.045	.010	.313	4.520	.011
	WP	2.989E-5	.000	.393	5.091	.007
	KPP	.983	.244	.338	4.024	.016

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Nilai statistik uji t yang terdapat pada tabel 4.32 selanjutnya akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} untuk menentukan apakah variabel yang sedang diuji berpengaruh signifikan atau tidak.

1) Pengaruh Produk Domestik Bruto Secara Parsial Terhadap Penerimaan pajak.

Untuk menguji pengaruh Produk Domestik Bruto terhadap penerimaan pajak maka diperlukan pengujian statistik secara parsial dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Merumuskan hipotesis statistic

Hipotesis kesatu

$H_0 : \beta_1 = 0$: Menunjukan bahwa Produk Domestik Bruto secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak Indonesia.

$H_a : \beta_1 \neq 0$: Menunjukan bahwa Produk Domestik Bruto secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak Indonesia.

b. Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi tersebut adalah sebesar $\alpha = 0{,}05$ atau 5 % dengan derajat kebebasan (df= n-k-1) df= 8-3-1= 4, dimana nilai t_{tabel} pengujian dua arah sebesar 2,776.

c. Mencari nilai t_{hitung}

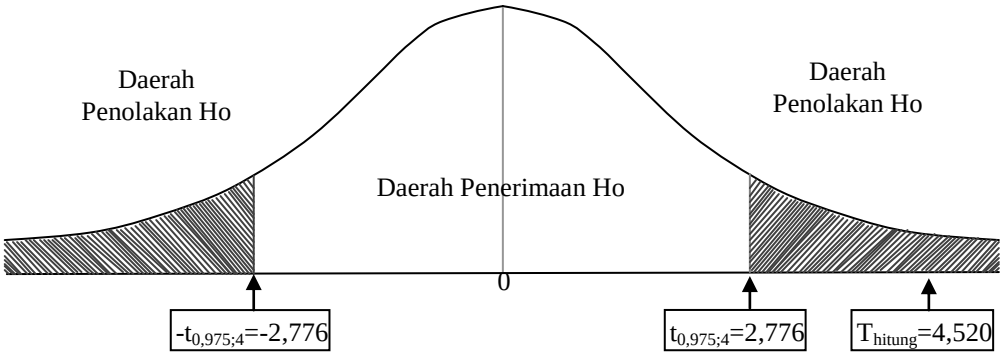
Dengan bantuan software SPSS.17, seperti terlihat pada tabel 4.32 diperoleh nilai t_{hitung} variabel Produk Domestik Bruto sebesar 4,520

d. Menentukan daerah penerimaan penerimaan atau penolakan hipotesis dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dengan ketentuan :

Jika $t_{hitung} > t_{tabel,}$ atau $t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka H_0 ditolak (signifikan)

Jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 diterima (tidak signifikan)

Maka hasil yang diperoleh dari perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} adalah $t_{hitung} < t_{tabel}$ (4,520 > 2,776), sehingga pada tingkat kekeliruan 5% Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti Produk Domestik Bruto secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan uji hipotesis dapat digambarkan daerah penolakan dan penerimaan Ho sebagai berikut:



Gambar 4.16
Grafik Penolakan dan Penerimaan Ho Pada Uji t Produk Domestik Bruto Terhadap Penerimaan pajak

e. Pengambilan keputusan hipotesis

Berdasarkan gambar 4.16 diatas dapat dilihat bahwa Ho ditolak, karena t_{hitung} sebesar 4,520 berada pada daerah penolakan Ho, yang berarti bahwa Produk Domestik Bruto secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel penerimaan pajak Indonesia.

2) Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Secara Parsial Terhadap Penerimaan pajak.

Untuk menguji pengaruh jumlah Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak maka diperlukan pengujian statistik secara parsial dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Merumuskan hipotesis statistik

Hipotesis kedua

$H_0 : \beta_2 = 0$: Menunjukkan bahwa jumlah Wajib Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel penerimaan pajak di Indonesia.

$H_a : \beta_2 \neq 0$: Menunjukkan bahwa jumlah Wajib Pajak secara parsial berpengaruh terhadap variabel penerimaan pajak di Indonesia.

b. Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi tersebut adalah sebesar $\alpha = 0{,}05$ atau 5 % dengan derajat kebebasan (df= n-k-1) df= 8-3-1= 4, dimana nilai t_{tabel} pengujian dua arah sebesar 2,776.

c. Mencari nilai t_{hitung}

Dengan bantuan software SPSS.17, seperti terlihat pada tabel 4.32 diperoleh nilai t_{hitung} variabel jumlah Wajib Pajak sebesar 5,091.

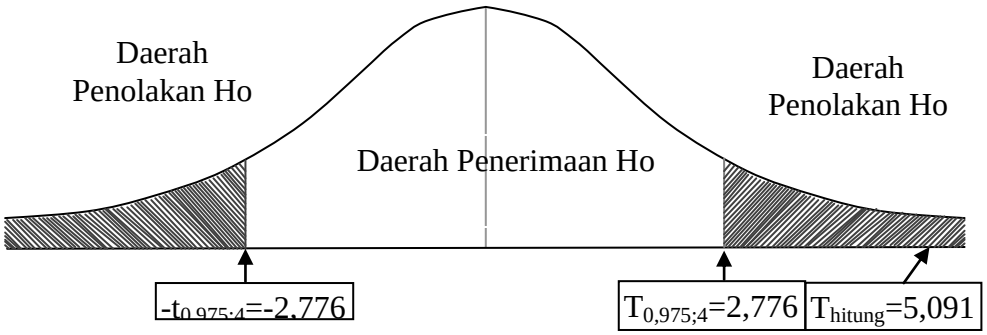
d. Menentukan daerah penerimaan atau penolakan hipotesis dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dengan ketentuan :

Jika $t_{hitung} > t_{tabel,}$ atau $t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka H_0 ditolak (signifikan)

Jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 diterima (tidak signifikan)

Maka hasil yang diperoleh dari perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} adalah $t_{hitung} > t_{tabel}$ (5,091 > 2,776), sehingga pada tingkat kekeliruan 5% Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti variabel jumlah Wajib Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan uji hipotesis dapat digambarkan daerah penolakan dan penerimaan Ho sebagai berikut :



Gambar 4.17
Grafik Penolakan dan Penerimaan Ho Pada Uji t Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan pajak

e. Pengambilan keputusan hipotesis

Berdasarkan gambar 4.17 diatas dapat dilihat bahwa Ho ditolak, karena t_{hitung} sebesar 5,091 berada pada daerah penolakan Ho, yang berarti bahwa jumlah Wajib Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di Indonesia.

3) Pengaruh Jumlah Kantor Pelayanan Pajak Secara Parsial Terhadap Penerimaan pajak.

Untuk menguji pengaruh jumlah Kantor Pelayanan Pajak terhadap penerimaan pajak maka diperlukan pengujian statistik secara parsial dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Merumuskan hipotesis statistik

Hipotesis ketiga

$H_0 : \beta_3 = 0$: Menunjukkan bahwa jumlah Kantor Pelayanan Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel penerimaan pajak di Indonesia.

$H_a : \beta_3 \neq 0$: Menunjukkan bahwa jumlah Kantor Pelayanan Pajak secara parsial berpengaruh terhadap variabel penerimaan pajak di Indonesia.

b. Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi tersebut adalah sebesar $\alpha = 0{,}05$ atau 5 % dengan derajat kebebasan (df= n-k-1) df= 8-3-1= 4, dimana nilai t_{tabel} pengujian dua arah sebesar 2,776.

c. Mencari nilai t_{hitung}

Dengan bantuan software SPSS.17, seperti terlihat pada tabel 4.32 diperoleh nilai t_{hitung} variabel jumlah Kantor Pelayanan Pajak sebesar 4,024.

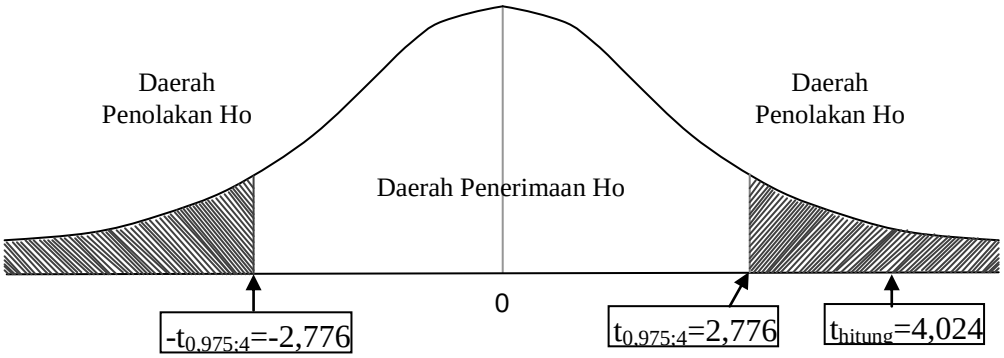
e. Menentukan daerah penerimaan atau penolakan hipotesis dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dengan ketentuan :

Jika $t_{hitung} > t_{tabel,}$ atau $t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka H_0 ditolak (signifikan)

Jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 diterima (tidak signifikan)

Maka hasil yang diperoleh dari perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} adalah $t_{hitung} < t_{tabel}$ (4,024 > 2,776), sehingga pada tingkat kekeliruan 5% Ho diterima dan Ha ditolak yang berarti variabel jumlah Kantor Pelayanan Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan uji hipotesis dapat digambarkan daerah penolakan dan penerimaan Ho sebagai berikut :



Gambar 4.18
Grafik Penolakan dan Penerimaan Ho Pada Uji t Jumlah Kantor Pelayanan Pajak Terhadap Penerimaan pajak

f. Pengambilan keputusan hipotesis

Berdasarkan gambar 4.18 diatas dapat dilihat bahwa Ho diterima, karena t_{hitung} sebesar 4,024 berada pada daerah penolakan Ho, yang berarti bahwa jumlah Kantor Pelayanan Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak Indonesia.